

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayahnya serta inayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratuan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholders kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta ini dan yang terakhir, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi,

2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI,

NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Tk. IV (IV.b)

NIP. 19740708 200212 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayahnya serta inayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratuan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholders kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta ini dan yang terakhir, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi,

2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI,

NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Tk. 1 / (IV.b)

NIP. 19740708 200212 1 007

# **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayahnya serta inayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratuan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholders kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta ini dan yang terakhir, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi,

2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI,

NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Tk. I / (IV.b)

NIP. 19740708 200212 1 007

#### IKTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penertapan/Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan membuat Rencana Strategis Teknokratik Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mewujudkan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, yaitu:

- Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
- Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.

Dalam kaitannya tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah membuat Penertapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	MAKNA
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	ВВ	BB	Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	MAKNA
2	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	100%	100%	Target Tercapai

Dari 2 (dua) sasaran strategis beserta sasaran indikatornya, seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan ini didukung oleh tersedianya APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024, Pagu murni yang dianggarkan Rp 108.398.244.300,- setelah perubahan menjadi Rp 111.790.119.300,- adapun realisasinya sebesar Rp 106.914.176.545,- dengan rincian untuk Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dianggarkan Rp 12.284.068.740,- adapun realisasinya sebesar Rp 11.091.995.307,- untuk Belanja Langsung Urusan (BLU) dianggarkan Rp 8.907.368.860,- adapun realisasinya sebesar Rp 6.084.040.238,- untuk Belanja Hibah dianggarkan RP. 96.682.721.938,- adapun realisasi Rp 89.751.766.000,- untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan sebesa Rp 9.149.542.000,- adapun realisasinya sebesar Rp 8.892.463.853,-

Secara keseluruhan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada Tahun 2024 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada Tahun 2024 dan seterusnya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah. Agar senantiasa dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai diharapakan adanya kerjasama, saling pengertian dari berbagai pihak yang terkait baik kritik dan saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dimasa datang.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran yang telah ditetapkan menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesbangpol Kota Bekasi ke depan, sebagai berikut:

- Keadaan masyarakat Kota Bekasi yang heterogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial;
- Masih terdapat peredaran gelap Narkoba di Kota Bekasi yang memerlukan perhatian, penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan pencegahan dini yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat;

- Masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena kurangnya pemahaman tentang politik dan demokrasi;
- Masih adanya Organisasi Kemasyarakatan yang tidak melaporkan organisasinya ke Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
- Masih maraknya kenakalan remaja yang mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Bekasi;
- Mempertahankan Kota Bekasi sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (The City of Tolerence).

Sebagai penutup, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membimbing kita selalu.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKTISAR EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	11
DAFTAR CAMBAR	v
DAFTAR GAMBARv	vi
BAB 1	ii
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI	1
1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	5
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI	3
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN DAN PENULISAN	5
BAB 2	)
PERENCANAAN KINERJA 22	2
2.1 RENCANA STRATEGIS	2
2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2024	
AKUNTABILITAS KINERJA30	
3.1 CAPAIAN KINER IA ORGANISASI	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA31	
3.3 REALISASI ANGGARAN49	
3.4 INOVASI	1000
3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN58	
3.6 KOLABORASI LINTAS SEKTOR59	
BAB 471	
PENUTUP71	
4.1 KESIMPULAN71	
4.2 KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA71	
4.3 RENCANA TINDAK73	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Unit
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Pendidikan (s.d bulan Desember 2024)
Tabel 1. 3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per Desember 2024
Tabel 1. 4 Daftar Sarana Perkantoran Dan K
Tabel 1. 4 Daftar Sarana Perkantoran Dan Kondisinya Per Desember 202411
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
1 abel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bekasi
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol
Tabel 2. 4 Pagu anggaran Bakesbangpol
Tabel 3. 1 Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi TA 2024
Tabel 3. 2 Capaian Program Badan Keshangpol untuk Mandulana C
Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024
Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 1)
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra-PD (Sasasaran Strategis 1)
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 1)
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Indikator Utama Persentase Kasus SARA yang diselesaikan
<b>Tabel 3. 7</b> Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi
Tabel 3. 8 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 2)
<b>Tabel 3. 9</b> Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra-PD (Sasaran Strategis 2)47
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional         (Sasaran Strategis 2)
<b>Tabel 3. 11</b> Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Per Program Tahun 2024
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun         Anggaran 2024 dan Perbandingan dengan tahun 2023
Tabel 3. 13 Renja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan         Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
To the state of th

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Pegar	wai Badan Kesbangpol Berdasarkan Esselonoring .7
Gambar 1. 2 Diagram pegav	wai Badan Kesbangpol Berdasarkan Unit Kerja8
Gambar 1. 3 Diagram pegav	wai Badan Kesbangpol Menurut Pendidikan9
Gambar 1. 4 Struktur Bada	n Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi10
Gambar 3. 1 Dokumentasi l	kegiatan Pembinaan penguatan ideologi Pansila n 202441
Gambar 3. 2 Dokumentasi k	kegiatan Pendidikan Politik Daerah Tahun 2024 .42
Gambar 3. 3 Dokumentasi k	kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan nasyarakatan Tahun 202443
<b>Gambar 3. 4</b> Dokumentasi K Pemerintah Daerah dengan 1	Kegiatan Sinergitas Kerukunan Umat Beragama Fokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kota 44
Gambar 3. 5 Dokumentasi K	Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini45
Gambar 3. 6 Dokumentasi K	Kegiatan Pengawasan Terpadu Organisasi asi Tahun 202456
Gambar 3. 7 Dokumentasi F	asilitasi Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di
Gambar 3. 8 Dokumentasi P	enghargaan Kota Bekasi Peringkat ke-2 sebagai Tahun 202458



# PENDAHULUAN

# 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Oleh karena itu, melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap 3 aspek, yaitu:

 Akuntabilitas Manajemen, aspek ini terfokus pada pengukuran kesanggupan dan efesiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, asset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain;

- 2) Akuntabilitas Proses, aspek ini terfokus pada pertanggungjawaban kebijakan, strategis dan proses pelaksanaan kinerja organisasi yang telah dilakukan. Proses ini dimulai dari perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi terhadap proses yang sudah dilakukan;
- 3) Akuntabilitas Program, pengukuran ini dilakukan terhadap program-program organisasi yang telah dilakukan apakah telah memberikan kepuasan kepada publik. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah :

- Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, hasil guna, bersih dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupkan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapt dipertanggungjawabkan;
- Mengetahui segaa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
- Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
- Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan tekah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang disediakan.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Utama (IKU) dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Teknokratik tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubaan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 merancang strategi pembangunan secara komprehensif mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berkaitan langsung

dengan aspek tata kelola pemerintahan, serta keamanan dan ketertiban kota yang ada pada RPD Kota Bekasi, maupun Sasaran yang ada pada Renstra Teknokratik PD Tahun 2024-2026. Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

#### · Indikator Sasaran I:

Nilai AKIP Badan Kesbangpol dengan satuan nilai. Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 dijelaskan bahwa Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 1 RPD 2024-2026 Kota Bekasi adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, yang salah satu indikatornya menetapkan Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sasaran Strategi Arah Kebijakan Pembangunan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 1 Badan Kesbangpol.

#### · Indikator Sasaran II:

Persentase Kasus SARA yang diselesaikan dengan satuan persen (%). Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 dijelaskan bahwa Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 4 RPD 2024-2026 Kota Bekasi adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman, dengan Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat yang salah satu indikatornya menetapkan Prosentase Kerjasama

Antar Kelompok Sara. Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 2 Badan Kesbangpol.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun sebelumnya (2024) dimana 2 (dua) indikator tersebut telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yag telah ditetapkan dalam Renstra Teknokratik PD pada Tahun 2024, dengan realisasi capaian indikator sasaran ke-1 yaitu indikator Nilai AKIP Badan Kesbangpol mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 76,72 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu predikat nilai BB, sasaran ke-2 yaitu Persentase Kasus SARA yang diselesaikan memperoleh capaian kinerja sebesar sebesar 100%, sasaran. Adapun pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam mendukung Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 ini.

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dab Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, mempunyai Kepala Badan Kesbangpol mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut:

## 1. Tugas Pokok yaitu:

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik untuk mencapai visi dan misi Badan.

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi, yaitu :
  - perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat,
     Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - pembinaan administrasi perkantoran;
  - 5) pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perhubungan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
  - pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
  - pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  - penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 10) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang Pemerintahan Umum, serta memiliki peran penting di dalam menjaga stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut akan sangat mempengaruhi kestabilan dinamika pembangunan di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

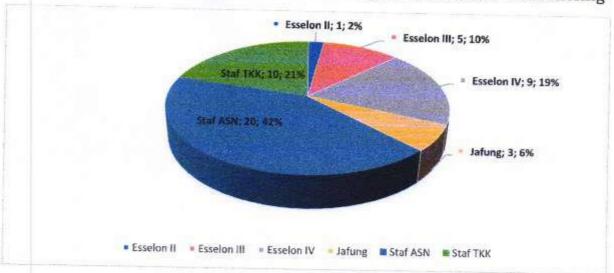
Bakesbangpol adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang urusan penunjang lainnya dalam hal Pemerintahan Umum, Trantibum, serta Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Bakesbangpol tersebut, maka diberlakukanlah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Dalam Perwal tersebut dijelaskan bahwa Bakesbangpol Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bakesbangpol dibantu oleh Sekretaris Bakesbangpol yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 4 (empat) bidang yaitu: Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Bidang Politik Dalam Negeri.

Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam melaksanakan tupoksi pelayanan didukung dengan oleh 48 pegawai yang terdiri dari 38 orang Aparatur Sipil Negara dan 10 Orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Secara sederhana, gambaran

pegawai pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut jabatan/ esselon dapat dilihat dari gambar diagaram di bawah ini :

Gambar 1. 1 Diagram Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Esselonoring



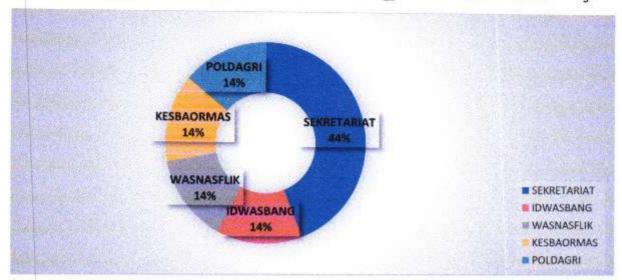
Sejumlah pegawai yang tersedia di Badan Kesbangpol Kota Bekasi tersebut kemudian ditempatkan ke unit-unit kerja yang tersedia, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 1** Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Unit Kerja (s.d bulan Desember 2024)

NO	Sekretariat/	y Hann	AS	N	With	TH	K	(SUPPLY ST
41.6	Bidang	L	P	JML	L	P	JML	Total
1	Sekretariat	6	7	13	4	3	7	20
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	4	1	5	1	1	2	7
3	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	6	1	7	32	-	-	7
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	5	2	7	-	1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	-	7
5	Bidang Politik Dalam Negeri	6	-	6	-	1	1	7
	Jumlah Total	26	11	38	5	5	10	48

Sumber Data: Umpeg Badan Keshangpol (Diolah Perencanaan)

Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi berdasarkan unit kerja dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. 2 Diagram pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Unit Kerja

Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditinjau dari segi pendidikan, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:

**Tabel 1. 2** Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Pendidikan (s.d bulan Desember 2024)

SDM		Pendidikan Terakhir						
	Jumlah	S3	S2	S1/D4	D3	SMA		
Pejabat struktural	15	( <del>-</del> )	8	7	-	100		
Jabatan Fungsional	3	140	2	1	#	( <del>4</del> )		
Staf Pelaksana (ASN)	20	1	2	8	-	9		
Staf Pelaksana (Non ASN)	10	-	-	5	2	3		
Jumlah	48	1	12	21	2	12		

Sumber Data : Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas, pegawai Badan Kesbangpol yang berpendidikan SMA sebanyak 25%, berpendidikan D3 sebanyak 4,17%, berpendidikan S1/D4 sebanyak 43.75%, berpendidikan S2 sebanyak 25% dan berpendidikan S3 sebanyak 2,08%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai Badan Kesbangpol berpendidikan SMA dan S1/D4. Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut pendidikan dapat dilihat dari gambar berikut:

Staf Pelaksana (Non ASN)
Staf Pelaksana (ASN)
Jabatan Fungsional
Pejabat struktural
SMA D3 S1/D4 S2 S3

Staf Pelaksana (ASN) Staf Pelaksana (Non ASN)

Gambar 1. 3 Diagram pegawai Badan Kesbangpol Menurut Pendidikan

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

- 1. Kepala Badan, membawahkan:
- 2. Sekretariat, membawahkan:

Pejabat struktural

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
  - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

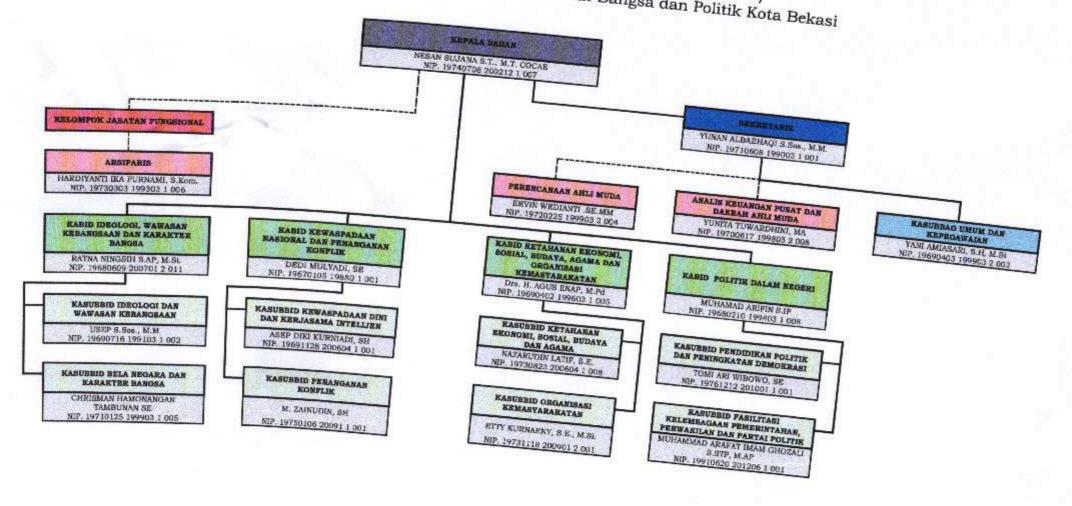
Jabatan Fungsional

- b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- 4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
  - a. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjsama Intelijen;
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
- Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

# BAGAN STUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL

(Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)

Gambar 1. 4 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi



# 1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, diperlukan sarana dan prasarana kerja serta asset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per Desember 2024

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI
KIB	A	W/M 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
1	Kendaraan Roda 2	6	В
2	Kendaraan Roda 4	12	
3	Mesin Absen (time Recorder)		В
4	Lemari Besi	1	В
5	Rak Besi	40	В
6	Filling Cabinet Besi	4	В
7	Brandkas	40	В
8	Lemari Kaca	1	В
9	CCTV	2	B
10	Projector/Infocus	2	В
11	Meja Kerja		В
12	Kursi Kerja	48 48	B
13	Televisi		В
14	Sound System	1	В
15	Wireless	1	В
16	Dispenser	3	В
17	Kulkas	2	В
18	Proteksi Kebakaran (Hydrant, Apar)	1	В
19	Camera digital	1	В
20	Komputer PC	28	B
21	Laptop	10	В
22	Printer	11	<u>В</u> В
KIB E		11	В
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	В

Selain itu dalam rangka melaksanakan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, sarana yang mendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Daftar Sarana Perkantoran Dan Kondisinya Per Desember 2024

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Rapat	1	Kondisi baik
2	Toilet/WC	1	Kondisi baik
3	Ruang Arsip	1	Kondisi baik
4	Ruang Repsepsionis dan kursi tunggu tamu	1	Kondisi baik
5	Ruang Kerja Kepala	1	Kondisi baik

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
6	Ruang Kerja Sekretaris	1	Kondisi baik
7	Ruang Kerja Sekretariat	1	Kondisi baik
8	Ruang Kerja Kepala Idwasbang	1	Kondisi baik
9	Ruang Kerja Bidang Idwasbang	1	Kondisi baik
10	Ruang Kerja Kepala Poldagri	1	Kondisi baik
11	Ruang Kerja Bidang Poldagri	1	Kondisi baik
12	Ruang Kerja Kepala Wasnasflik	1	Kondisi baik
13	Ruang Kerja Bidang Wasnasflik	1	Kondisi baik
14	Ruang Kerja Kepala Kesbaormas	1	Kondisi baik
15	Ruang Kerja Bidang Kesbaormas	1	Kondisi baik
16	Mushola Kantor	1	Kondisi baik
17	Kendaraan Dinas Kantor	1	Kondisi baik
18	Ruang Pantry	1	Kondisi baik
19	Air bersih dan listrik	Paket	Kondisi baik

Untuk sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi belum terlalu ideal untuk ukuran kantor yang seharusnya. Salah satunya yaitu ruang pendukung seperti belum terdapat ruang perpustakaan dan ruang laktasi yang memadai. Hal ini perlu adanya perbaikan ruang kantor agar terciptanya yang lebih representatif.

#### 1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"- 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6030'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km2 yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa isu-isu strategis yang terjadi di tahun 2024 yang di tangani oleh Badan Kesbangpol, diantaranya Kota Bekasi termasuk ke dalam Kota Multikultural yang terdiri dari banyaknya perbedaan unsur yang ada di dalam masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama atau aliran kepercayaan, kondisi ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang rawan konflik hal tersebut dapat menyebabkan masalahmasalah sosial yang muncul di Kota Bekasi, tidak terlepas dari meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampaknya, kaum urban yang menjadi pengangguran menjadi beban ekonomi dan beban sosial yang berat bagi masyarakat dan pemerintah. Besarnya pengangguran akan meningkatkan kerawanan sosial di Kota Bekasi. Adapula peranan Bakesbangpol juga di tahun 2024 terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilakukan di tahun 2024, prioritas Bakesbangpol di tahun 2024 terkait fasilitasi pemilu serentak mencakup berbagai aspek penting. Bakesbangpol berfokus pada penguatan koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan lancar dan efektif. Selain itu, Bakesbangpol juga menekankan pentingnya kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemilu, agar partisipasi pemilih dapat meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Di samping itu, Bakesbangpol berupaya menciptakan ekosistem pemilu yang sehat dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemilu. Hal ini termasuk pengawasan terhadap praktik politik yang tidak etis, penyebaran informasi yang tidak akurat, menjaga kondusivitas dan mencegah konflik sosial, penguatan pendidikan politik, serta koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk menciptakan iklim politik yang sehat. Bakesbangpol diharapkan dapat mengoptimalkan keberagaman politik sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bakesbangpol sebagai Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan di

bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, serta Politik Dalam Negeri memiliki tugas untuk menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan Bangsa demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan Daerah.

# 1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Bakesbangpol pada tahun 2024 terdiri dari:

## I. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

- 1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, yaitu :
  - ✓ Kegiatan Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - √ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## II. Belanja Langsung Urusan (BLU)

- 1.1. Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu:
  - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
    - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 1.2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
  - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu:
  - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 1.4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
  - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
    - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
    - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 1.5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Secara umum layanan organisasi Bakesbangpol menjalankan fungsifungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Badan Kesbangpol telah dialihkan menjadi fungsi urusan penunjang lainnya di bidang Ketentraman dan ketertiban umum.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Bakesbangpol yaitu:

- 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan advokasi terkait wawasan kebangsaan, 4 (empat) pilar kebangsaan, bela negara, pengguatan fungsifungsi pembauran kebangsaan dan pembentukan serta pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) di Kota Bekasi. Bidang Kesatuan Bangsa juga memiliki tugas memberikan pelatihan kepada masyarakat pemula untuk dijadikan sebagai kader bela negara.
- 2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, memiliki tugas dan fungsi dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan. Produk-produk layanan dalam bidang ini antara lain Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah, Survei peninjauan lokasi rumah ibadah dan sekretariat ormas, merumuskan kebijakan ormas dan kemasyarakatan, menerima audiensi pengurus rumah ibadah, pengurus ormas dan tokoh agama/masyarakat, serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Lapor bagi Organisasi Kemasyarakatan.
- 3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terkait gejala/ potensi kerawanan sosial yang ada di masyarakat. Melakukan kajian dan pemetaan wilayah kerawanan sosial di Kota Bekasi. Bidang ini juga

bertugas untuk memberikan fasilitasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Daerah untuk melaksanakan tugas menjaga trantibum di Kota Bekasi. Produk layanan dari Bidang ini adalah Surat Tanda Lapor Orang Asing dan Laporan situasi dan kondisi daerah.

4. Bidang Politik Dalam Negeri, memiliki tugas dan fungsi memberikan palatihan, sosialisasi, dan pendidikan terkait politik dalam negeri kepada masyarakat, dan pengurus Partai Politik. Merumuskan kebijakan tentang bantuan hibah dan bantuan keuangan yang akan diberikan kepada Partai Politik dan Lembaga Pemerintah. Bidang ini juga memberikan fasilitasi terkait pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik di daerah.

# 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN DAN PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

### BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

# B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Bakesbangpol didasarkan atas Rencana Strategis Teknokratik Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Pj. Wali Kota Bekasi dan Kepala Bakesbangpol Kota Bekasi TA. 2024, dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dengan (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2024 dengan target satuan yang ingin dicapai dari program, kegiatan, sub kegiatan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemenmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 berisi tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

## 2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Teknokratik yang telah memuat tujuan dan sasaran dalam tujuan pembangunan KotaBekasi untuk periode 2024-2026. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

# 2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan RPD Kota Bekasi yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Pembangunan Kota Bekasi untuk periode 2024-2026 adalah djabarkan ke dalam 5 tujuan, dan 11 sasaran. Dari ke 5 tujuan tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap Tujuan 1 yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel" dan Tujuan 4 RPD yaitu "Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman". Sasaran 1 dan 4 RPD tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 tujuan, yaitu:

- Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
- Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.

Dari misi tersebut, Badan Kesbangpol harus melakukan pemilahan terkait pencapaian tujuan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pemilahan yang dilakukan terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang ada di dalam 2 (dua) tujuan tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan tujuan pembangunan yang menjadi tujuan badan dari 2 (dua) sasaran RPD tersebut.

Untuk tujuan kesatu RPD Kota Bekasi, ditinjau dari tujuan tersebut Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki keterkaitan secara tupoksi dengan Tujuan RPD "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel". Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel ini kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran "Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi" sasaran ini diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sedangkan untuk misi keempat RPD Kota Bekasi, dengan tujuan "Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman" memiliki keterkaitan erat tupoksi Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Tujuan ini memiliki sasaran yaitu "Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat." Sasaran ini kemudian diukur melalui indikator Persentase Kasus SARA yang diselesaikan. Tentunya indikator ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tupoksi yang ada di Badan Kesbangpol.

Secara ringkas Tujuan, dan Sasaran RPD Kota Bekasi yang memiliki keterkaitan tupoksi dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Berdasarkan penjelasan di atas maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Startegis (Renstra) Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi periode 2024-2026. Adapun tujuan dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah:

- Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
- Merawat persatuan dan ksatuan masyarakat dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman.

Untuk mencapai tujuan di atas maka dilakukan penetapan sasaran perangkat daerah guna mendukung tercapainya tujuan.

Sasaran adalah prediksi hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (sampai dengan 1 tahun). Adapun sasaran dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah:

- Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
- Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Secara terperinci, tabel 2.1 di bawah ini akan menyajikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pemaparan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yang telah ditetapkan ini akan dijabarkan ke dalam indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 3 (tiga) tahun.

**Tabel 2. 1** Tujuan dan Sasaran Pelayanan Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator	Data Existing	Tujuan	get Kine / Sasara ahun Ke	an Pada	
1000		Commence of the Commence of th		Sasaran	Existing	1 (2024)	(2025)	(2026)	
1	Mewujudkan Akuntabilitas	Terwujudnya Akuntabilitas	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	-	BB	BB	BB	
	Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi		Nilai AKIP Badan Kesbangpol	-	BB	BB BB		
2	Merawat persatuan dan ksatuan masyarakat dengan mengembang kan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarak at di Kota Bekasi	Persentase pembinaan persatuan dan kesatuan dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaand an kerukunan serta keberagaman bagi masyarakat yang dilaksanakan Kesbangpol Kota Bekasi			100%		BB BB	
	керегиданын			Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	-	100%	100%	100%	

Sumber Data: RPD Kota Bekasi 2024-2026 dan Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

# 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menetapkan menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- 1. Nilai AKIP Badan Kesbangpol dengan satuan nilai. Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 dijelaskan bahwa Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 1 RPD 2024-2026 Kota Bekasi adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, yang salah satu indikatornya menetapkan Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 1 Badan Kesbangpol;
- 2. Persentase Kasus SARA yang diselesaikan dengan satuan persen (%). Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada RPD

Kota Bekasi 2024-2026 dijelaskan bahwa Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 4 RPD 2024-2026 Kota Bekasi adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman, dengan Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat yang salah satu indikatornya menetapkan Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara. Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 2 Badan Kesbangpol;

Misi dan tujuan RPJMD tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU Badan Kesbangpol. Untuk penjelasan lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2. 2** Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bekasi

NO SASARAN		SASARAN RU		SATUAN	TARGET 2024	
1	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Hasil penilaian Laporan AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB	
2	Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	(Jumlah Kasus SARA yang ditangani /Jumlah Kasus SARA yang dilaporkan) x 100%	Persen	100%	

Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

#### 2.4 PERJANJIAN KINERJA 2024

Berdasarkan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 6 (Enam) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang penunjang tertentu lainnya seperti berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- 6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program-program pada Bakesbagpol Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis kesatu adalah Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dengan indikator kinerja Nilai AKIP yang diperoleh oleh Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2024, indikator menargetkan pencapaian indikator nilai AKIP Kesbangpol dengan predikat nilai BB. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran strategis kedua Bakesbangpol yaitu Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi dengan target indikator kinerja yaitu Persentase Kasus SARA yang diselesaikan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah kasus perselisihan SARA yang diselesaikan sebesar 100%. Pada Tahun 2024, Bakesbangpol menargetkan seluruh kasus perselisihan Suku, Ras dan Antar Golongan dapat tertangani dengan baik. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program, yaitu Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol

STATE OF THE PERSON NAMED IN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Terwujudnya akuntabilitas	Nilai AKIP Badan	Nilai	Bb	Triwulan 1 Triwulan 2	-
	pelayanan publik	Kesbangpol			Triwulan 3	- 8
					Triwulan 4	BB

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN	TARGET
	dari Badan Kesbangpol			00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	many and court of	
2	Terwujudnya	Persentase	% (Persen)	100	Triwulan 1	25%
	kerukunan,	Kasus SARA			Triwulan 2	25%
	Toleransi dan	yang			Triwulan 3	25%
	partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	diselesaikan			Triwulan 4	25%

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA 2024 dan Rencana Aksi 2024.

Untuk mencapai hasil kinerja pada tabel di atas, Badan Kesatun Bangsa dan Politik Kota Bekasi diberikan dukungan anggaran APBD Kota sebesar Rp. 111.790.119.300,- dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Pagu anggaran Bakesbangpol

	PROGRAM	PAGU ANGGRAN	TRIWULAN	TARGET
1	Program Penunjang	Rp. 12.284.068.740,-	Triwulan I	Rp. 3.948.317.041,-
	Urusan Pemerintah		Triwulan 2	Rp. 3.976.651.709,-
	Daerah		Triwulan 3	Rp. 2.444.021.052,-
	Kabupaten/Kota		Triwulan 4	Rp. 1.915.078.938,-
2	Program Perguatan	Rp. 2.290.812.860,-	Triwulan I	Rp. 312.832.800,-
	Ideologi Pancasila		Triwulan 2	Rp. 831.278.820,-
	dan Karakter		Triwulan 3	Rp. 1.138.280.540,-
	Kebangsaan		Triwulan 4	Rp. 8.420.700,-
3	Program	Rp. 8.595.411.700,-	Triwulan I	Rp. 5.952.050.000,-
3	Pemberdayaan dan		Triwulan 2	Rp. 2.643.361.700,-
	Pengawasan		Triwulan 3	Rp. 0,-
	Organisasi Kemasyarakatan		Triwulan 4	Rp. 0,-
4	Program	Rp. 84.282.426.000,-	Triwulan I	Rp. 79.407.875.000,
	Peningkatan Peran		Triwulan 2	Rp. 532.220.000,-
	Partai Politik dan		Triwulan 3	Rp. 998.736.000,-
	Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Triwulan 4	Rp. 3.343.595.000,-
5		Rp. 1.000.000.000,-	Triwulan I	Rp. 92.012.000,-
	dan Pengembangan		Triwulan 2	Rp. 907.988.000,-
	Ketahanan Ekonomi,		Triwulan 3	Rp. 0,-
	Sosial dan Budaya		Triwulan 4	Rp. 0,-
6	Program	Rp. 3.337.400.000,-	Triwulan I	Rp. 1.023.960.000,-
C. T.	Peningkatan		Triwulan 2	Rp. 1.190.130.000,-
	Kewaspadaan		Triwulan 3	Rp. 691.169.000,-
	Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Triwulan 4	Rp. 432.141.000,-

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA. 2024 dan Rencana Aksi TA. 2024



#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja institusi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Proses pengukuran kinerja dilakukan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di dalamnya menyajikan beberapa. Dokumen LKIP disusun dengan melakukan analisa dan pengumpulan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2024 dapat dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dilakukan dengan mengukur indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang ada di Rencana Startegis (Renstra) Teknokratik Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan aspek realisasi pelaksanaannya.

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bakesbangpol Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

 Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;  Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3. 1** Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi TA 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	KETERANGAN
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	BB	BB	Tercapai
2	Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	%	100	100	Tercapai

(Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026)

Secara keseluruhan capaian sasaran Badan Kesbangpol mencapai 100%. Untuk indikator ke-1 dengan sasaran terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi menggunakan model perhitungan Penilaian Laporan AKIP Badan Kesbangpol.

Pada indikator ke-2 dengan sasaran Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi menggunakan model perhitungan Persentase Kasus SARA yang diselesaikan dengan rincian:

<u>Jumlah Kasus SARA yang ditangani</u> x 100 % Jumlah Kasus SARA yang dilaporkan

Pembahasan lebih rinci terkait 2 (dua) sasaran kinerja Badan Kesbangpol akan dibahas pada bagian Analisi Capaian Kinerja pada sub bab selanjutnya.

# 3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penjabaran tabel Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol di atas, dapat ditarik analisa mengenai pencapaian kinerja Badan Kesbangpol TA 2024. Adapun evaluasi dan analisa kinerja sasaran sebagai berikut:

 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sasaran yang pertama adalah terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai AKIP Kesbangpol. Sasaran ini menekankan tentang kualitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Kesbangpol kepada masyarakat. Target yang ditetapkan untuk sasaran terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik adalah nilai AKIP Kesbangpol dengan predikat nilai Bb. Adapun realisasi nilai yang berhasil didapatkan oleh Kesbangpol sebesar Bb. Upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Kesbangpol untuk mendapatkan Nilai SAKIP BB adalah sebagai berikut:

- Melakukan sinkronasi di dalam menyusun dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun perangkat daerah (Teknokratik). Sinkronasi tersebut dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selaras dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, RPJPD Kota Bekasi, RPJMD Provinsi dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, serta RPJMN Kemendagri dan Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri RI;
- ✓ Melakukan sinkronasi di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Sinkronasi tersebut dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
- Melakukan penyusunan dokumen penerjemah dari dokumen perencanaan secara terperinci yang meliputi seluruh aspek pencapaian kinerja perencanaan perangkat daerah. Dokumen penerjemah yang dimaksud antara lain:
  - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesbangpol Tahun Anggaran
     2024;
  - Tabel alur sasaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesbangpol;
  - Tabel keselerasan perencanaan Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024;
  - Rencana Aksi kinerja pada Badan Kesbangpol untuk Tahun Anggaran
     2024;
  - Pohon kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024;
  - Cross Cutting Kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024;

- Cascading Badan Kesbangpol dan cascading Indikator Kinerja Individu
   (IKI) aparatur Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024; dan
- Melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) per esselon hingga ke tingkat staff aparatur Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- Melakukan penyusunan dokumen monitoring dan pencapaian evaluasi dari pencapaian kinerja perencanaan perangkat daerah. Dokumen penerjemah yang dimaksud antara lain:
  - Evaluasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 per triwulan;
  - Evaluasi capaian kinerja fisik (Monev dan Simpelbang) Tahun Anggaran 2024 per triwulan;
  - o Evaluasi capaian kinerja fisik dan anggaran Tahun 2024 per bulan. Dengan demikian, gambaran umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator program yang mendukungnya. Pencapaian program adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2** Capaian Program Badan Kesbangpol untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	SATUAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	Tercapai
	Daerah Kabupaten/K ota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	Tercapai
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	%	Tercapai
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	%	Tercapai

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol

## Perbandingkan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dengan Tahun lalu.

### IKU 1: Nilai AKIP Kesbangpol

Defenisi Operasional:

Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat (Tahun n-1).

Dimana semakin tinggi nilai SAKIP PD berarti semakin tinggi tingkat kinerja PD.

- o Realisasi Data Kinerja Tahun 2024:
  - Nilai LKIP (SAKIP) Kesbangpol (2023) : Bb (75,14)
  - Nilai LKIP (SAKIP) Kesbangpol (2024): Bb (76,72)

Sebagaimana definisi Operasional, maka: Realisasi Data Kinerja = Bb

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Kesbangpol Tahun 2024 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3. 3** Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 1)

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	BB (75,14)	BB (76,72)

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah ditentukan.

### Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingakan dengan target dalam Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026.

Pada tahun pertama (2024) Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi, manargetkan Nilai AKIP Kesbangpol adalah dengan predikat nilai BB. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target realisasi kinerja pada Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2024-2026, realisasi kinerja tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan nilai Bb, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 4** Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra-PD (Sasasaran Strategis 1)

No	Indikator		Tahun 2024		Capaian s.d	Tahun 2024		Capaian Tahun
	Kinerja Sasaran	The state of the s	Target	Realisasi	Tahun 2024 (Nilai)	Target	Realisasi	Terakhir Renstra (Nilai)
1	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	ВВ	BB	BB (76,72)	BB	BB	BB (70)

### Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis 1 (Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi) ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar atau target nasional (jika ada).

Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 1 ini, bahwa pada tingkat nasional secara khusus tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3. 5**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Nasional Tahun 2024
1	Nilai AKIP Kesbangpol	BB (76,72)	Tidak Ada

# Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.

Sasaran strategis yang kedua adalah Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator Persentase Kasus SARA yang diselesaikan. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu jumlah kasus SARA yang ditangani dibagi jumlah kasus SARA yang dilaporkan dikali 100%. Jumlah konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Bekasi selama tahun 2024, yang jika dianalisis dapat menimbulkan potensi kondlik di Kota Bekasi. Jumlah konflik yang terjadi dan terdata dari bulan Januari 2024 hingga Desember 2024 sebanyak 39 kasus yang dimana dari laporan tersebut sebagian besar didominasi dari proses pelaksanaan pemilu serentak yang merupakan rangkaian, tahapan proses pelaksanaan dari pesta demokrasi di Tahun 2024. Laporan yang terindikasi mengenai SARA di tahun 2024 hanya terdapat 1 kasus, yang dimana kasus tersebut juga sangat berpotensi konflik, akan tetapi kasus tersebut dapat ditangani dan diselesaikan melalui penanganan bersama pihak-pihak yang terlibat. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. 6** Analisis Pencapaian Indikator Utama Persentase Kasus SARA yang diselesaikan

	Indikator Kinerja		Tahu	n 2024	Capaian
No	Sasaran Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	%	100	100	100

Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, Badan Kesbangpol berhasil menekan jumlah kejadian perselisihan SARA di masyarakat. Umumnya penyebab perselisihan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang terjadi di Kota Bekasi adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan yang sangat bersifat sensitif karena menyangkut tentang agama, kebangsaan/suku dan antar golongan. Tingkat pencapaian Badan

Kesbangpol di dalam menangani kasus SARA di masyarakat sebesar 100% yang artinya target tercapai.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

- a. Dukungan dana dari Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait, Badan Kesbangpol bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyrakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini dan Forkopimda saling sinergis dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik perselisihan SARA di masyarakat yang mencakup antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di Kota Bekasi. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi konflik yang berkaitan dengan SARA. Untuk itu, pemerintah harus berusaha menciptakan suasana yang mendukung toleransi dan antar umat beragama. Langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi masalah SARA di masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan, perlu terlibat dalam upaya ini.
- Dukungan warga Kota Bekasi secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kota Bekasi.
- Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan Kesbangpol sendiri.

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Terdapat 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Bekasi. Berikut tabel Program, Indikator Program, Target, dan Realisasi serta Capaian Kinerja Program pada tahun 2024 ini:

Tabel 3. 7 Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN	KET
1	Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100%	Tercapai
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100	100	100%	Tercapai
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakata	100	100	100%	Tercapai
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	100	100%	Tercapai
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial r Data: Renstra Teknokra	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100	100	100%	Tercapai

Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

Korelasi antara program-program yang disebutkan dengan sasaran terwujudnya kerukunan, toleransi, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

# Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan karakter kebangsaan. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kerukunan dan toleransi antar sesama, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Hal ini akan menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai di antara berbagai kelompok masyarakat.

## Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan etika dalam berpolitik. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat akan lebih memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan politik, serta menghargai perbedaan pendapat, yang merupakan bagian dari kerukunan dan toleransi.

# 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

 Melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Program ini juga mencakup pengawasan untuk memastikan bahwa organisasi-organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi dan keadilan. Dengan adanya organisasi yang kuat dan berfungsi dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah berkolaborasi dan berpartisipasi dalam menciptakan kerukunan dan toleransi.

## Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

 Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang baik akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan stabil. Ketika masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan, potensi konflik dapat diminimalisir. Program ini juga dapat mendorong masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama, sehingga meningkatkan kerukunan dan toleransi di antara berbagai kelompok.

# 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial:

 Program ini berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik sosial yang mungkin terjadi. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menangani konflik, masyarakat dapat lebih cepat merespons potensi permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan. Program ini juga dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai. Secara keseluruhan, semua program tersebut saling mendukung dan berkontribusi pada terciptanya kerukunan, toleransi, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kesadaran politik, memberdayakan organisasi kemasyarakatan, membangun ketahanan sosial dan ekonomi, serta menangani konflik secara efektif, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan saling menghargai.

Penjelasan capaian Kinerja Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1) Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**Gambar 3. 1** Dokumentasi kegiatan Pembinaan penguatan ideologi Pansila dan Karakter Bangsa Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah fasilitasi pembinaan ATHG Nasionalisme NKRI yang ditangani dibagi jumlah ATHG Nasionalisme NKRI yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang mendapat pembinaan dan pendidikan wawasan kebangsaan sebanyak 1620 Orang yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Mengenai cakupan program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang mengurusi urusan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Kota Bekasi dalam rangka menjaga Nasionalisme NKRI di Kota Bekasi. Adapun pembinaan sebagaimana dimaksud:

- a. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Bekasi;
- b. Fasilitasi Pendidikan Bela Negara di Kota Bekasi;
- c. Fasilitasi Pendidikan Konsepsi Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai pancasila di Kota Bekasi;
- d. Pembentukan dan Pembinaan Akitivitas Paskibraka Kota Bekasi.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

**Gambar 3. 2** Dokumentasi kegiatan Pendidikan Politik Daerah Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah fasilitasi penanganan ATHG kondusifitas politik daerah yang ditangani dibagi jumlah ATHG kondusifitas politik daerah yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang mendapat pembinaan dan pendidikan politik daerah sebanyak 2400 Orang yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Di sisi lain, cakupan program Pembinaan Politik Daerah sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang menangani urusan Politik Dalam Negeri terkait upaya menjaga stabilitas Politik di Kota Bekasi. Adapun pembinaan Politik sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi masyarakat Kota Bekasi;
- Fasilitasi bantuan keuangan bagi parpol di Kota Bekasi yang mendapat hak dan kedudukannya di parlemen;
- c. Fasilitasi bantuan dana hibah bagi lembaga pemerintah di Kota Bekasi.
   (KPU, BAWASLU, POLRES, KODIM)

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Gambar 3. 3 Dokumentasi kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah fasilitasi pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ditangani dibagi jumlah kebutuhan fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan memiliki target 300 Orang yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sementara itu, cakupan program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang memiliki tugas urusan Organisasi Kemasyarakatan terkait upaya peningkatan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kota Bekasi. Adapun pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a. Fasilitasi bantuan dana hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi;
- b. Fasilitasi legalitas Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi;
- c. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan yang berlaku terkait Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

**Gambar 3. 4** Dokumentasi Kegiatan Sinergitas Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Daerah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kota Bekasi Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah fasilitasi pembinaan ATHG ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani dibagi jumlah ATHG ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang mendapat pembinaan dalam rangka menjaga sinergitas kerukunan umat beragama di Kota Bekasi telah terealisasi 1700 Orang yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sedangkan cakupan program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang menangani urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam rangka menjaga kondusifitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi. Adapun pembinaan sebagaimana dimaksud, diantaranya:

- Fasilitasi Sinergitas tokoh masyarakat Kota Bekasi dengan pemerintah daerah;
- b. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi;
- c. Fasilitasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi;
- d. Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
   Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Bekasi;

- e. Fasilitasi Legalitas Penerbitan Pertimbangan Rumah Ibadah di Kota Bekasi.
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

**Gambar 3. 5** Dokumentasi Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah jumlah fasilitasi penanganan ATHG keamanan daerah yang ditangani dibagi jumlah ATHG keamanan daerah yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%. Pada tahun 2024 ini jumlah penanganan potensi konflik yang telah diterima oleh Badan Kesbangpol sebanyak 39 Kasus, dan dari keseluruhan kasus tersebut dapat tertangani dengan baik oleh Badan Kesbangpol berserta jajaran unsur terkait dalam melakukan penanganan potensi konflik di Kota Bekasi. Mengenai cakupan program Penanganan Potensi Konflik Daerah sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khusunya Bidang yang menangani urusan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam rangka menjaga stabilitas keamanan daerah di Kota Bekasi. Adapun penanganan sebagaimana dimaksud, diantaranya:

- Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi (FKDM, TNI, POLRI, BINDA, KEJAKSAAN, IMIGRASI. dll);
- b. Fasilitasi Forkopimda Kota Bekasi, forum ini diketuai Wali Kota Bekasi dan beranggotakan : Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi.

- c. Fasilitasi legalitas Surat Keterangan Lapor Orang Asing di Kota Bekasi;
- d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang undangan terkait
   Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi;
  - Perbandingkan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dengan Tahun lalu.

#### IKU 2: Persentase Kasus SARA yang diselesaikan

#### Defenisi Operasional:

Jumlah Kasus SARA yang ditangani tahun (n) dibagi Jumlah kasus SARA yang dilaporkan tahun (n) dikalikan 100%.

- o Realisasi Data Kinerja Tahun 2023 s.d 2024 :
  - Jumlah Kasus SARA yang ditangani tahun n-1 (2023) : 2 Kasus Realisasi Data Kinerja =  $\frac{2}{2}x$  100% = 100%
  - Jumlah Kasus SARA yang ditangani tahun n (2024) : I Kasus Realisasi Data Kinerja =  $\frac{1}{1}x$  100% = 100%
- o Sebagaimana definisi operasional dari indikator kinerja ini, bahwa Semakin banyak kasus atau konflik yang terselesaikan, semakin besar pengaruhnya terhadap ketercapaian indikator tersebut. Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kasus SARA yang diselesaikan di Kota Bekasi Tahun 2024 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3. 8** Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capsian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	Persen	100	100

(Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026)

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu tidak tidak ada data perbandingan karena merupakan indikator baru pada Renstra Teknokratik tahun 2024-2026 dan realiasasi target sesuai dengan target yang telah ditentukan.

# Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingakan dengan target dalam Renstra Teknokratik Kesbangpol 2024-2026.

Pada awal tahun (2024) Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi, ditargetkan Persentase Kasus SARA yang diselesaikan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2026 pada Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2024-2026, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 9** Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra-PD (Sasaran Strategis 2)

	Indikator		Tahu	in 2024	Capaian s.d	Tahu	ın 2024	Capaian Tahun
No	Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tahun 20224 (%)	Target	Realisași	Terakhir Renstra (%)
1	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

### Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis 2 (Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi) ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar atau target nasional (jika ada). Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 2 ini, bahwa pada tingkat nasional tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3. 10** Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Nasional Tahun 2024
1	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	100%	Tidak Ada

Bahwasanya terhadap standar atau target nasional dalam hal ini dalam urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bahwa realisasi dan capaian kinerja pada tingkat sasaran strategis ini sangat mendukung atau sejalan dengan program nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

#### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 111.790.119.300,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 9.149.542.000,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 102.440.577.300,-. Belanja Langsung Urusan (BLU) terdiri dari Belanja Langsung Urusan (BLU) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.907.368.860,- untuk Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 90.598.681.700,-. dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.134.526.740,-. Anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program-Program pembangunan Badan Kesbangpol sebagai berikut:

**Tabel 3. 11** Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Per Program Tahun 2024

200		PAGU AN	
NO	PROGRAM	SEBELUM	SETELAH
NO		PERUBAHAN	PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.232.588.740,-	Rp. 12.284.068.740,-
2	Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.290.812.860,-	Rp. 2.290.812.860,-
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 8.595.411.700,-	Rp. 8.595.411.700,-
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 80.942.031.000,-	Rp. 84.282.426.000,-
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
6	Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 3.337.400.000,-	Rp. 3.337.400.000,-
all like	TOTAL	Rp. 108.398.244.300	Rp. 111.790.119.300

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Total Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 108.398.244.300,- menjadi Rp. 111.790.119.300,-. Adapun realisasi anggaran yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas;

1	KIP BADAN KESBANGPOLTAHUN 2024		TAHUN ANGGARAN 2025
•	Belanja Tidak Langsung	: Rp	8.892.463.853,-
•	Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	2.199.531.454,-
ß	Belanja Langsung Urusan	: Rp	6.070.415.238,-
	Belanja Hibah	: Rp	89.751.766.000,-
	Jumlah	: Rp	106.914.176.545,-

Secara terpirinci, realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung Urusan (BLU), Belanja langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 dan Perbandingan dengan tahun 2023

Program/Kegiatan	/Bub Registon	Indikator Program/S	Ceglaton/Sub Seglatan	Program/I	Indicator Orgintan/Sub	Program/I	d Indikator Engleten/Sub	Prepa	Angguran	Real	Hearl (Mp)	1	Cest (NJ	Topy	Ket
2023	2024	2023	3024	2023	2024	2023	2034	2023	2024	2023	2024	-	Control of	Cr.	The same
Program Pennstung Urusan Pennerintakan Daerah Kabupaten/Kata	Program Femunang Union Pemerintahan Deerah Kabupaten/Keta	Optimalisasi pengembangan sistem pelaberan capaino kinerjo dan keuangan	Optimalisasi pengembangan watem pelaponan repaian kinerja dan kecangan	100,00%	100%	200,00%	108%	18.079.597.61	12,284,068,740	9.078.207.469	11.091.995.307	90,07	90,30	2023	2024
Perencacaan, Penganggamo, dan Evaluasi Kincrja Perangkat Daeroh	Perencanaan, Penganggaran, dan Evuluasi Kmerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencamaan, Penganggaran, dan Bushansi Kinerja Perangkat Dasrah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kincrja dan Kasangan	100%	100%	100%	100%	3.009,000	17,000,000	2,960,000	15.625.000	98,67	80,15		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Caption Kinerja dan Ilahtsar Realisasi Kinerja SKPU	Koordinasi dan Penyusunan Laporas Capsian Kmerja dan Eddisar Redisasi Kinerja SKPD	Jumish Laporan Capatan Kinerja dan Ikbulaar Realisasi Kinerja SKPO dan Laporan Hard Koordhasai Penyusuman Laporan Capatan Kinerja dan Idalisar Realisasi Kinerja SKPO	Jumiah Laporan Caparan Kinerja dan Ikhitsar Realicasi Kinerja SKPD dan Laporan Basil Koordhasel Penyusuman Laporan Capatan Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1 Laporan	i Lapotein	2 Laporan	3.000.000	17,000.000	2,960,000	13,625,000,00	98,67	80,15	Bhales	Blisten
Administrasi Keuangan Perangkat Diserah	Administrast Kecangan Perongkat Ducroh	Persentase Kruangen Perangkat Daerah	Optimalsasi Pergembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan	100%	100%			8.897.620,000	9.157.542.000	7,546-269.130	8.899,213.853	89,31	97,18	1,100	200
Penyediaan Geji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumiah Grang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menarima Gaji dan Tunjangan ASN	1.086,00 Owng/bul an	1,026 Orang/Bul	976 Orang/Bul	1026 Oreng/Bul on	8.894.620.000	9:149.542.000	7.943.269.130	6.892.463.853,0 0	89,30	97,19	Efisien	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulunan/Trivulanan/Semest erah SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Lapuran Keuangan Bulanan/ Triwulamen/ Semesteran SKPU	Jumish Laporen Keuangan Buhman / Triwulanan / Semestran SEPD dan Laporan Kondinasi Penyusuhan Laporan Keuangan Bulanas / Triwulanan / Semest enu SEPD	Jumish Luporan Keuangan Bulanan, Trivudanan/ Semosteran SKPD dan Laporan Roordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Trivulanan/Semest eran SSPD	18,00 Leporen	17 Laponen	18 Laparen	i7 Leparen	3.000.000	8,000.000	3.000.000	6-750,000,00	100,0	84,38	Effsien	Effisien
		Optimalisani Proingkatan Kapanbis Sumber Daya Apanbur	Cotimulaces Persinghaten Kapasitas Succiber Daya Aparatur	100,00%	100%	100,00%	100%						REER		Santa d
Administrasi Sepegawaian Penangkat Daerah	Administrani Kepagawatan Perangkat Daman	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkas Daerah	Optionalisant Peningkatan Rapastitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		e e l'es	20.000,000	484,927,780	20.000.000	304.698.000	100,0	62,83	Rhaleo	Risten
	Progedeen Pakean Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Juniah Paket Pakaian Umas beserta Atribut Kelengkapan	Art-Scelle	2 Paket		2 Paloet		200,000,000		136.750.000,00		58,38	Effsien	Eltsten
Pendidikan dan Pelathan Pegawai Berdasarkan Tugan dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatikan Pegawat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pregawei Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8,00 Orang	12 Oming	6 Orang	0 Orung	20.000.000	26.000.000	20.000.000	0	0,001	0,00	Kfislen	Tidak Břisien
	Pembingan Teknis Implementasi Peruturan Perundang Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang		48 Orang		264,927,780		167,948,000,00		63,39	Efficien	Effalen
		Optimalismi Pelayanan Administras, Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkenteran	100,00%	200,00%	100,00%	100%		Lange 1	WORLS.	100000000000000000000000000000000000000	Y. She	Service III.	TQUE	in the same
Administraat Umum Penangkat Daerah	Administraci Umum Perangkat Doerah	Persentase Administrasi Umtas Perangkat Danmi	Optimalisani Pelayanan Administras: Perkanturan	100%	100%			330,000,000	947.781.750	303.345.751	563.8E8.609	91,92	59,49	a paying one	A EA
Penyudiaan Bahan Legistik Kantor	Penyediaan Rahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Juminh Paket Bahan Logistik Kantur yang Disediskan	3,00 Paket	3 Paloet	3 Paket	3 Paket	170,000,000	350,000,000	152,289,000	822.875.200,00	89,58	92.26	Stalen	Rinlen
Penyedisan Barang Cetalean dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Juminh Paket Barang Cetakan dan Penggarakan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggondaan yang Disediskan	2,00 Paket	12 Paket	2 Paket	12 Paket	30.000.000	75.000.000	30.000.000	41.780.000,00	100,0	55,71	Efisien	Efinien
Penyediam Bahan Bacsan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Hacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baranas dan Peratuman Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dakumen Behan Bacaan dan Pembaran Perundang-Undangan yang Disediakan	3,00 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	20,000.000	50.000.000	14.370.000	21.362.500,00	91.85	42,73	Istiales	Risien.

Program/Kegistan/	Bub Registan	Indikatur Program/Ro	giatan/Sub Meglatan	Target II Program/Ke	glaten/Sub	Realisani Program/Ke Kagi	giatan/Sub	Pagn A	nggarah	Realis	nel (Rp)	Ke	e (%)		Set
Liefarmi refractati			2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2093	2024	2023	2024
2023 Penyelenggarman Ropet Coordinasi dan Knosultasi	Penyelenggaram Rapat Koordinasi dan Komauhasi SEPD	Jumiah Laperan Penyelenggurunn Rapat Koordinasi dan Kooruhasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Keordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laponus	12 Laporan	12 Laporas	12 Laporum	100.000.000	422.781.750	92.866.751	153 225,309,00	92,87	36,24	Efisien	Effsien
KPD Tenatsusahaan Arsip Dinants tada SKPI)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD Jumlah Bokumen Penatasasahaan Araip Dinamis mada SKPD	Jumish Dokumen Penatausahaan Aratp Dinamis pada SKPD	250,00 Dekumen	12 Dokumen	230 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	50,900,000	9,820,000	24.614.600,00	98,20	49,23	Effsten	EffaSen
ada 8870		pana skr U	Optimalisses Peningkoton Sorona dan Francisco Aparatur	300,005	100,00%	100,00%	100%				COLUMN TO SERVICE				
	Pengadaan Betang Milik Demah Penanjang Urasan		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prusarana Apuratur		100%			0	510.218.250	0	292,040,000		57,24		
	Pemerintah Daerah Pengadaan Pemintan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		34 Unit		34 Unit		510,218,250		292,040,000,00		57,24	Effsinn	Kflaten
	EW EDWAR	Optimalmesi Prisyanan Administrasi Perkantusan	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100%		pastell)						2.51
Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedisan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentese Penyadisan Jesa Penunjang Urusan Pemerintahan Deerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkanturan	100%	100%			548,777.613	\$14.598.950	540 381.590	507,017,960	98,47	98,53		
Penyrdiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyedinan Juan Pelayanan Umum Kantar	Jumish Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantur yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyedisan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laparan	12 Laporan	12 Laporen	12 Laparus	546,777,613	S14.598.950	540,381,590	507.017.960,00	98,47	S2,80	Bhaien	Etisien
		Optimalisasi Peningkatau Saranadan Prasarana Apanatar	Optimalisasi Pecingesian Barana den Presama Aparaha	100,00%	300,00%	100,00%	100%	TA IA							ME
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peminjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemelhaman Barang Milk Daetah Penunjang Urusah Pemerintahan Daetah	Persentase Pemelinaraan Barung Misic Derrah Penunjung Urusuri Pemerintah Daerah	Optimalisusi Peningkatan Sarana dan Prasareta Aparatur	100%	100%			280,000,000	652,000,000	265.250.998	511,541,665	94.73	78,46		
Penyadisan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendansan Perusugan Dinas- atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinaa atau Kendaman Dinaa	Juniah Kendaraun Penrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharo dan dibayarkan Pajaknya	Juniah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kendarasa Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22,00 Unik	22 Unit	22 Unit	22 Unit	250,000,000	377.000.000	235.250.998	909 959 885,00	94,30	82,22	Efisien	Bilolen
Pemetiharaan Peralatan dan Mesin Lainuwa	Jahatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perelatan dan Mesin Lainnya yang Dipelbara	Jumiah Pendatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliham	25,00 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	30.000.000	75.000.000	30.000.000	37.340.000.00	100,0	49,79	Efficien	Rheien
RESULTATION.	Pemeliharaan/Rekabiin asi Gedung Kantur dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lamnya yang Dipelham/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit		200,000,000		164 242 000 00		82,12	Klisien	Rheien
Program Penguatun Ideologi Puncasta Dan Karakter Kebangsuan	Program Penguntan Ideologi Pencastia Dan Karakter Kebangsaan	Persentass Penguatan Ideologi Parscaalis den Karakter Kebangsonn	Optimalisasi Pembinuan Ideologi Pancanila dan Karakter Kebangsaan	50%	100,0054	SON	\$00,004	2.611.586,860	2,290.812.860	2.272.801.860	1.663,350,736	90,90	72,61		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idoologi Pencasila dan Kanakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemahkapan Prisksorsan Bidang Ideolog Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentasa Peningkatan Penahaman Meukgi Pancasila dan Karakter Reborgsaan di Masyarakat Kota Bikasi	Optimaliansi Pembinaan Meskegi Pemcarila dan Karaktes Kebangsasa	100%	100%	100%	100%	2.611.580.860	2.290,812.860	2,373,801,860	1.663.369.738	90.90	72,61		
Pelaksanaan Sebijakan di Bidang telecingi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurai Kebangsaan, Binela Tunggal Ika dan Sejanah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang lileologi Wawasan Kebangasan Bela Kegara, Karakter Bangsa, Pembausan	Jumiah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebejakan di Bidang lelelogi Wasmosan Kebangsaan, Bela Nepara, Kniakter Bangsa, Petabauran Kebangsaan, Biseka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Grang yang Mengikuti Pelaksanaan Kehijakan di Bidang lebengi Wawasan Kebangsaan, Bela Negata, Karakrei Benga, Pembutan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	840 Orang	1.520 Grang	840 Orang	510 Orang	2.611.5NO.860	2.290.812.860	2,373,801,860	1.663.360.738,0 0	90,90	72,61	<b>Etalen</b>	Efisien

Program/Kegistan/	Sub Kegistan	Indikator Program/Re	ngistan/Sub Kegintan	Program/K	ndikator egistan/Sub latan	Program/K	Indikator egiatan/Sub latan	Page A	nggaran	Resid	nant (Ny)	Ke	w (%)		Cept
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Program Produjisatan Perun Partsi Pulnik Dan Lembaga Prodidikan Melalus Pendidikan Pulnik Dan Pempembangan Etha Serta Budaya Palitik	Program Peningkatan Penan Partat Politik Dan Lembaga Pendatrikan Melahal Pendatrikan Politik Dan Pengambangan Erika Serta Madaya Pulitik	Personbiae Pembinaan Politik Daetah	Cutimalisasi Pembinaan Politik Daerah		100,86 W		100,00%	51.145.625.00 0	84.282.426.000	55.674.495.59 9	83.219.113.500	91,05	98,74		
Perumusan Kebbakan Teknia dan Pemastupan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Patrik Erisa Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pasilinas Kebembagian Pemarutahan, Perwakilan dan Parta Politik, Pendihan Unsun/Pemilihan Unsun Kepala Duerah, serta Penauntaian	Perumasan Kebijahan Yeknis dan Pelantapan Pelantapan Pelantapan Pelantapan Pelantapan Pelantapan Pendilikan Politik, Peningkatan Demeirnei, Fastitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakhar dan Partai Politik, Pemilhan Unium/Persilihan Gasum Kepala Daerah, serta Pemataanan	Jumlah Masyacakai yang mendapat Pembinsan Poblik di Kota Bakasi	Optimaliansi Penibinaati Politik Daetah	100%	100%	1004	100%	\$1.148.836.80 0	84 282 426,000	\$5,674,496,58 9	83,219,113,500	91.03	98.74		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pelitik, Etika Budaya Pohek, Peningkatan Demakrasi, Pasilinai Kelembagaan Penserinthaan, Perwakhan dan Pantai Politik, Pendihan Uruun/Pendihan Uruun Kepala Durrah, seria Pemantaisan Situazi Politik di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pelitik, Esiza Budaya Pulitik, Peningkatan Demokrasi, Fassitiasi Kolemingasia Pemerintahan, Perenkinanan, Perenkinan dan Fartai Peliki, Pendihan Umuan/Pendihan Umuan Kepala Daerah, serta Pemaninuan Shuasi Politik di Daerah	Jumish Bokumen Program. Kerja di Bidang Pendidikan Pedidik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pasilhasi Kelembaguan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pendihan Umung/Pendihan Umung Kepala Daerah, aerta Pemantusuan Situosi Politik di Do	Jumiah Dekumen Program Kerja di Bidang Percidifican Folitik, Rida Bidaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pensitasi Kekenbagaan Percerintahan, Perwahlan dan Pertai Politik, Pembhan Unsam/Peruihhan Unsam Kepak Daerah, serta Pemantatan Sittasi Politik di Da	11 Dekumen	21 Dokumen	11 Dakussen	21 Dokumen	59.867.790.00 0	B2.748.270.000	\$4,930,051.18 9	82.421.786.000, 00	91,75	99,61	105slen	Kfieleto
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Edida Badaya Politik, Edida Badaya Politik, Peningkatan Demukrasi, Pasilihasi Kelembagaan Penerastaban, Perwakkian dan Partai Pulitik, Pendihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Darrah, Seria Pemantatan Sibaasi Politik di Daerah	Pelaksunaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Persakilian dan Fartai Politik, Pendilihan Umum Kepata Dasrah, Serta Pumantauan Skuasi Politik di Dasrah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Bitka Bushaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilikasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakitan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pul	Jumlah Orang yang Mangikusi Koordinani di Bidung Pendidihan Politik, Etika Buduya Politik, Peningkatan Demokrani, Fanilitani Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Pedilik, Pemilihan Unaum Femilihan Umum Kepala Darah, serta Pemantauan Situnsi Pol	2.260 Orang	2.400 Orang	2260 Orang	2168 Ovang	1.246.880.000	1,500,000,305	744,445,400	797.347.500,00	59,70	53,16	Elisien	Bfisien
Pelaksanaan Minitoring. Buduasi dan Peleposan di Badang Pendidikan Politic. Biba Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi, Ponlibasi Kelembagaan	Pelsikannaan Manifecting, Evel-haari dan Pelappran de Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Parlitiasi Kelembagaan Permerialahan, Permelikan dan Parlai Politik, Pendilihan Umum, Permilihan Umum, Permilihan Umum, Senaintuan Sirmasi Pulitik di Daerah Daerah	Jumlah Laporae Hasil Monitoring, Erakuasi dan Pelaporan di Bridong Irandidikan Politik, Erika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pasifikasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakikan dan Partai Politik, Permikhan Umum, Pemilihan Usuam Kepala Daerah, serta Peman	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidong Pendidikan Publik, Edika Hudaya Pelilik, Penlingkatan Demokrasi, Pasikani Kekmbagasan Pencerintahani, Perwakilan dan Partai Politik, Pemiliban Umum/Femiliban Umum Kepala Duerah, seria Peman	12 Laporan	12 Lisperan	12 Láporan	12 Laporers	34.356.000	34,156,000	;0	Q	0,00	0,08	Telak Elisien	Tidak Efisien
Program Pemberdayaan fian Pengrwasan Organisani Kemasyarakatan	Program Pemberdaynan Dan Pengawasan	Persentase juminh organisani kemasyarakutan yang dibina	Opticulismi Pembinson Organisasi Kemanyamkatan	100%	100%	100%	100%	9.235.000.000	8.598.411.700	8,740,230,000	7.864.024.500	94,44	91,73		The second

Program/Registan/S	sh Keciatan	Indikator Program/Rep	inten/Sub Registes	Target in Program/Key Kagis	giatan/Bub	Realisani l Program/Re Regis	gistan/Sub	Pagn Ar	nggaran	Realis	net (Kg)	Ke	u (%)		Ket
Program/ angustus)	The second second	The state of the s	2024	2023	2024	2023	2024	2093	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2/03
2023	2024	2023	THE PERSON NAMED IN COLUMN	100 mm		44									
	Urganisası Kemasyarakatan	<b>加速和指揮的基本企画</b>	Canada San San San San San San San San San Sa				100	THE PERSON NAMED IN					/ESS .5	(C)	
erumusan Kebijakan Teknis an Pemadiapan Pelakuanaan Sidang Pemberdayan dan Engovasan Organisasi Jemasyarahatan	Perumasan Kebijalan Tekuli dan Pemantapan Pelakasanaan Bidang Pemberlayaan dan Pengawanan Organisasi Kenyayarakatan	Juniah Organisani Kemusyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertiba administrasi di Kota Bekasi	Optimalisasi Pendintaan Organisasi Kemasyanakatan	100%	100%	100%	100%	9.255,000,000	8.595.411.700	8.740.230,000	7,884,324,500	94,64	91,73		
Penyununan Program Kecja dihidang Pendafuaran Ormasa, Pemberdapuan Ormasa, Espluasi dan Mediasi Sengkeh Ormas, Fengswasan Ormas dan Ormas Asing di Darrah	Penyusuman Program Kerja di Bahang Pendaltaran Cemas, Pemberdayaan Ormas, Esahassi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas dan Ormas	Jamiah Dekumen Program Kerjo di Bidang Pendatharan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Panhisei dan Mediasi Sengleta Ormas, Pragusisan Ormas dan Ormas Ading di Daerah yang Distatun	Jumiah Dekumen Program Kerja di Bikiang Pendatharan Ormos, Pemberdiayaan Ormos, Bwahusai dan Mediasi Bengketa Ormos, Pengawasan Ormos dan Ormos Asing di Daerah yang Disusun	26 Dokumen	41 Dakumen	24 Dokumen	37 Dolesmen	8,955,000,000	7,850.411,700	\$:605,000.000	7.330.000.000,0	96.09	93,37	Eficien	lCfiel
Pelaksaman Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Resiluat dan Mediari Sengkata Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Daerah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Dimas, Pemberdayaan Ormas, Evalusai dan Medisai Sengiota Ormas, Pengawaan Ormas dan Ormas	Jumiah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Emiluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Darnik	Jumish Orang yang Mengdicuti Peleksaman Sebijakan di Bidang Pendaffaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Swahuat dan Mediaal Sengketa Ormas, Pengawasan Ornas den Ormas Asing di Daerah	300 Orang	300 Orang	300 Orang	325 Orang	300,000,000	745,909,000	135,230.000	554.324.500,90	45,08	74,41	Efisien	85
Program Pendriman Dan Pengerbangan Krishanan Skotumi, Sosial Dan Bulaya	Asing di Daerah  Program Pembunaan  Dan Pengrimbangan Ketahanan Ekonomi, Susial, Dan Budaya	Cakupan Masyandat yang mebnapat pembinaan peningkatan pengunbangan ketahanan ekanomi sosial. budaya	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Kkerseni, Secol dan Budaya	0,17 ×	200%	0.17%	100%	800.800.000	1,000,000,000	661 082 000	788,962,000	82,64	78,90		
Peruminan Kebijakan Yeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bedang Ketabaran Ekonomi, Sosini dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Bionomi, Sosial dan Sudoya	Juniah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekosi	Optimolisest pembinaan dan pengembangan ketahunan Ekonomi, Sesial dan Bedaya	100%	190%	100%	100%	800,000,000	000,000,000.1	651,083,000	788.962.000	82,64	78,90		
Pelaksanaan Kebijakan di Belang Ketabaran Ekonomi, Sesial, Buriaya dan Pasijikati Penongaban Penyalagunasan Narkotika, Fasilizati Kerakuman Umat Beragaina dan Penghayat Keperayanii di Darrah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidong Ketahanan Ekonomi, Sosial. Badaya dan Panilkasi Penyalganaan Narkotika, Fosilitasi Kerakunan Umat Beragama dan Pengabayat Kepercayaan di Dacrah	Juminh Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kehijakan di Bidang Ketaharan Boutouni, Sorial, Budaya dan Fasifisati Pencegahan Penyalagunaan Narkotita, Fasifitasi Ketukuruan Umat Beraguna dan Penghayat Kepatsayaan di Daetah	Jumiah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahaman Ekonomi, Sossal Budaya dan Pasalihasi Penengahan Pempalagunaan Nathorita, Fasilinasi Kerukunan Umat Bengama dan Penghayat Kepertayaan di Daerah	1.250 Orang	1.700 Orang	1250 Orang	2450 Orang	800.000.000	1,000,000,000	661.083.000	788.962.000,00	82,64	78,90	Efisien	firia.
Program Peningkatan Kewaspadaan Kaskanal Dan Peningkatan Kunitan Ban Yasibbasi Penanganan Konita. Kesial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasonal Dan Peningkatan Kustitas Dan Pesilitasi Penanganan Konfilk Sosial	Peracritase penanganan koosike yang disebabkan oleh auku, ras dan antar golongan	Optimalessi Penangaran Polensi Konilik Daerah	100%	100%	IGPN	toox	1,495,208,000	3.337.400,000	3,835,081,000	2,266,420,500	80,20	67,93		
Perumusan Kebijakan Yekula dan Yelaksamaan Perumbapan Kesaspadaan Nasional dan Penangapan Kontik Sosial	Perumasan Kebiakan Telenis dan Pemasanan Pemasanapan Kecanpadaan Nasanal dan Penanganan Kendik Sorial	Persentase Fenangenen Ancaman, Tantangan, Hambetan dan Gengguan (ATHC)) di Kota Bekasai	Optimalissal Febangarian Poteral Konfilk Decrah	100%	190%	100%	100%	1.495.200.000	3.337.400.000	1.335.081.000	2.266.420.500	89,29	67,91		
Pelaksanaan Kebijakan di Ibdang Kewaspadaan Dini, Kerjasams Intellien, Pemantanan Orang Asing, Yenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Krasapadaan Perbatasan Antar Negara, Rasilitasi Kelembagaan Ilidang Kewaspadaan, serta	Pelakumman Kebijakan di Bidang Krwaspadean Dini, Kerja Saraa Inteljem, Pemantatan Crang Asing Aga Tembaga Asing Keunapadann Perbahasah antar Begara, Pasidiasah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadiann Dimi, Kerja Sama Intelljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan, Perbabasan andar Negatra, Pasiling: Kelembagaan	Jumish Orang yang Mengkuti pelaksannan Kebisikan di Balang Kempadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantanan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbabana antar Negara, Pasilinai Kelembagaan	400 Orang	400 Crang	406 Orang	280 Orang	845.200.000	845-260.000	748.731.000	569,568,000,00	ян, уч	67,39	Miniera	Rds

Program/Keglataa	/Bub Kegiatan	Indikator Program/	Kegiatan/Sub Hogistan	Program/K	adikator egistan/Sub inten	Program/Ke	Indikator egistan/dub latan	Page A	ingguran	Real	met (Rp)	Ke	ru (%)		Ket
2023	Kelembugaan Bidang Kewaspudaan, seria Prasaganan Konflik di Decsah	2023 Bidang Krwaspadaan, serta Penanga	2024 Bidang Kewaspadaan, serse Persanga	2023	2034	2023	2024	2023	2014	2023	2024	2023	2034	2023	202-
Pulaksanaan Monitoring, Byshuad dan Pelapusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjaanna Intelijen, Pemsantoium Oning Asing, Temaga Kerja Asing dan Lemboga Asing, Kedaspadaan Perbausan Antar Negara, Fusifikasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangusan	Pelaksamaan Monitoring, Roaksasi dan Pelaperan di Bidang Kewaspadaan Deni, Kerjassama Intellien, Pemantusan Omig Asing, Tenaga Keja Asing dan Lembaga Asing, Kroaspadaan Perhaitsan Antor Negara, Pasilitasi Kelembagan Bidang Kewaspadaan, esta Penanganan Konfik	Juminh Laporan Hasil Monitoring, Boshnasi dan Pelapotan di Didang Kewappadaan Dini, Kerja Sama intelijen, Femantarun Orang Asting, Tranga Kerja Asing dan Lembaga Aning, Kewaapadoan Perbatasan antar Nagara, Pasilinasi Kelembagaan Bidang Kowaspadaan, acris P	Jumbsh Lapurse: Hasil Monitoring, Evaluaci dan Pelapuran di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja. Soma Inselijen, Pemantasian Orang Asing, Tenaga Kerja. Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perhatasan antar Negara, Fasilitad Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serin P	12 Іеропал	12 Laporan	12 Laperan	12 Laporan	650.000.090	537300000	586.350.000	496 832 500,00	90,21	92,49	Rivien	Rfisten
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dekumen Hasti Pelaksanaan Forum Keordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 Dolcamen		12 Dokumen		1.955.000.000		1.200.000.000,0		61,36	Efisien	Effsten
	1 48 - 31		Petal					85.390.004.4 73	111.790.119.5 00	77.862.899.9 18	106.914,176.54 5	90,21	98,64	Effaic n	Effete D

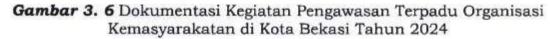
Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 26.400.114.827,-. Adapun pada tahun 2024 Badan Kesbangpol kota Bekasi telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran dari total pagu sebesar Rp. 111.790.119.300,-menjadi Rp. 106.914.176.545,- Badan Kesbangpol berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp. 4.875.942.755,- atau 3.39% dari total anggaran. Upaya efisiensi ini dilakukan untuk memastikan pembelanjaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan pencapaian target kinerja.

Untuk kedepannya efisiensi anggaran juga akan mempertimbangkan efektifitas pencapaian Zero Accident di dalam pengelolaan urusan Pemerintahan Umum di Kota Bekasi yang memiliki target tinggi. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol memerlukan sumber daya anggaran dan manusia yang kompeten untuk mencapai target tujuan yang telah ditetapkan.

#### 3.4 INOVASI

Tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut perangkat daerah untuk beradaptasi secara dinamis dan berpikir kreatif. Permasalahan serta keterbatasan sumber daya seharusnya dipandang sebagai pendorong untuk menciptakan gagasan dan ide-ide inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2024 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melakukan berbagai inovasi, antara lain:

a) Membentuk Tim Pengawasan Terpadu Organisasi Kemasyarakatan (Tepok Tangan) di Kota Bekasi





Pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas) memiliki manfaat yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan integritas ormas, serta untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dengan adanya pengawasan, ormas dapat memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mencegah tindakan ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pengawasan juga meningkatkan akuntabilitas ormas, mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan dana, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan masyarakat. Lebih jauh lagi, pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap ormas. Ketika ormas didorong untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkualitas, masyarakat pun akan lebih bersedia untuk berpartisipasi dan mendukung. Selain itu, pengawasan juga berperan penting dalam mencegah radikalisasi dan ekstremisme, serta mendukung pembangunan sosial dengan memastikan bahwa ormas tetap fokus pada tujuan yang positif dan konstruktif bagi masyarakat. Dengan demikian, pengawasan ormas sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Penyelenggaran pengawasan Ormas ini dilakukan secara kolaboratif oleh Badan Kesbangpol dan beberapa stakeholder terkait.

#### b) Fasilitiasi kegiatan Kerukunan Umat Beragama (KUB)

**Gambar 3. 7** Dokumentasi Fasilitasi Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi Tahun 2024

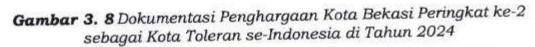


Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) para pemuka agama di Kota Bekasi diadakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama. Dalam FGD ini, para pemuka agama dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antaragama dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Badan Kesbangpol Kota Bekasi berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dengan mengkoordinasikan berbagai pihak dan memastikan bahwa diskusi berjalan dengan baik.

Melalui kegiatan FGD ini, para peserta dapat saling memahami perbedaan dan mencari solusi untuk mengatasi potensi konflik. FGD juga menjadi platform untuk menyampaikan pesan-pesan damai dan nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerukunan dan mendorong kolaborasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi semua. Secara keseluruhan, FGD para pemuka agama di Kota Bekasi, yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol, berperan penting dalam membangun masyarakat yang toleran dan saling menghormati, serta menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman yang ada. Dengan dukungan dari Badan Kesbangpol, diharapkan kerukunan antarumat beragama dapat terus terjaga dan diperkuat, menciptakan Kota Bekasi sebagai contoh bagi daerah lain dalam menciptakan harmoni sosial.

### 3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

 a) Peringkat ke-dua Kategori penghargaan Kota Toleran se-Indonesia yang diraih oleh Kota Bekasi di Tahun 2024





Kota Bekasi meraih penghargaan sebagai kota toleran berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, di mana kota ini berhasil menduduki peringkat kedua dari sepuluh kota se-Indonesia dengan skor 6,460. Penghargaan ini diberikan oleh Setara Institute sebagai pengakuan atas komitmen Kota Bekasi dalam menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Bekasi. Kota Bekasi menunjukkan dedikasi untuk menjaga Kebhinekaan Tunggal Ika, serta berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis tanpa membedakan suku, ras, dan agama.

Kegiatan kolaboratif seperti Focus Group Discussion (FGD) yang intensif dengan melibatkan pemerintah daerah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memperkuat hubungan antaragama baik yang diselenggarakan dan di fasilitasi oleh Badan Kesbangpol atau FKUB Kota Bekasi. Diskusi ini tidak hanya membantu saling memahami perbedaan, tetapi juga mencari solusi untuk potensi konflik dan menyampaikan pesan damai. Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, Kota Bekasi berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai untuk menjalankan norma agama, menjadikannya contoh bagi daerah lain dalam menciptakan kerukunan dan toleransi.

#### 3.6 KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama beberapa pihak. Pihak-pihak ini berasal dari berbagai instansi serta perwakilan tokoh masyarakat di Kota Bekasi. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas, dibentuklah tim dan forum, antara lain:

#### a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi

FKUB merupakan forum lintas agama yang dibentuk untuk melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan membina serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah. FKUB Kota Bekasi dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.130 -Kesbangpol/III/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.412-Kesbangpol/VIII/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi Masa Bakti 2021-2026.

### b) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi

FPK dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 341/Kep.246.A.Kesbangpol/IV/2020 dan memiliki fungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat rentan terhadap konflik melalui pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik.

### c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bekasi

Untuk mengatasi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat maka dibentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. FKDM Kota Bekasi dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Ke.75.A-Kesbangpol/II/2021. Pembentukan FKDM dimaksudkan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala suatu peristiwa.

### d) Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi

Tim Kewaspadaan Dini di dalamnya termasuk Komunitas Intelejen Daerah merupakan komunitas yang bertugas mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelejen, selain itu juga menggali atau mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari seluruh kota tentang segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas kota Bekasi. Komunitas ini terdiri dari beberapa lembaga/instansi diantaranya Polresta, Kesbangpol, Satpol PP, Kodim, BIN dan Kejari. Selain itu tim ini juga bisa memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman di daerah.

# e) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bekasi

Forkopimda merupakan Forum Koordinasi antar pimpinan lembaga yang ada di Kota Bekasi, forum ini diketuai Walikota Bekasi dan beranggotakan, Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi. Forkompida ini dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 200.1.1/Kep.103-Kesbangpol/I/2024, untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah pemerintahan umum di suatu daerah atau kota, dan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa didukung oleh seluruh komponen dalam pelaksanaannya, dan menjamin terlaksananya pemerintahan umum di kota Bekasi.

TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 3. 13 Renja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

131	3				KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 906.1.15.5- 1317 TAHUN 2023			9	alan Kinerja da	an Kerangka Pend	danaan		Praktraan Maju Tahur	i Rencana Kerja n 2025	10000000000000000000000000000000000000	Perangkat
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Keglatan/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencens Kerja	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun	Lokasi	Sumber		ioritas	Target	Pagu Indikatif	Kelompok Sasaran	Daerah Penanggung Jawab
					Sub Keglatan	Sub Keglatan		(RENJA) Tahun 2024	2024			Nasional	Daerah				
100	20 2 G	1	NA.	li.	2 3 6	H 100 3 100 100 100		5	6	7	8	9	10		12	73	14
					UNSUR REARRIFFASIAN UMUM												
	W.			U	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				111,790,119,800					The second	40015261.760		O DESCRIPTION
8		1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASSAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan	100 %	12,284,066,740					100 %	13,535,520,760		
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencahaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	17,000,000					100 %	175,000,000		
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0					1 Dakumen	150,000,000		
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Caparan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	17,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkual Stabilitas Pollukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	1 Lappran	25,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9,157,542,000					100 %	10,469,513,000		
8	1	1	2.02	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedisan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.026 Orang/Bulan	9,149,542,000	Kota Beitasi Beitasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Pengajian Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankem Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	1064 Grang/bulan	10,454,513,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Beden Kesatuan Bangsa Den Politik

LKIP BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024

The second					KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1,15.5- 1317 TAHUN 2023			Cap	aiah Kinerja da	m Kerangka Pend	ansan			ju Rencana Kerja in 2025		Perangkat
		Kod			Urusan/ Bidang Urusan/	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencana	Pagu Indikatif		W. S	Pri	oritas	图 25 图		Kelompok Sasaran	Daerah Penanggung
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Keglatan/ Sub Keglatan		Kerja (RENJA) Tahun 2024	Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		Jawab
6	35	7		131	2000	81   155   31位   165	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		6	7	8	9	10	2 2	12	13	14
8	1	,	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanary/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	16 Laporan	15,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %						100 %			
В	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persantase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	484,927,780					100 %	500,000,000		
8	1	,	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	200,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	SO Paket	200,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5	٦	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	20,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	18 Orang	56,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	,	2.05	11	Simbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	Bimbingan Teknis implentasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	50 Orang	264,927,780	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Somua Kelurahan	FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	52 Orang	250,000,000	Badan Kesbanggol Kota Bekasi	Bedan Kesatuan Bangsa Dan Politik
THE REAL PROPERTY.			n OF	is	The Development Line	40 80 King 1 CO.	Optimalisasi Pelayanan	100 %		TOTAL TO	125.05			100 %	A SHEW AND IN	AND THE PARTY	
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Perkanteran Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	947,781,750					100 %	1,075,000,000		
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Sahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	3 Paket	350,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

推進					KEPMENDAGRI NOMOR 858-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	1		C.	palan Kinerja d	an Kerangka Pen	danaan			ju Rencana Kerja m 2025		
		Kod			Unusan/ Bidang Unusan/	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencana	Pagu Indikatif Rencana Kerja		Sumber		rioritas			Kelorapok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung
					Program/ Kegiaten/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		(RENJA) Tahun 2024	(RENJA) Tahun 2024	Lekasi	Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif	1 李玉	Jawab
	0.00	7	AN THE	327	1851 - 1862 - SHIP - SE		CONTRACTOR SALES	13 TH	6		8/2 /	9	10	2)	12	13	14
							military and a second					Pelayanan Publik		The state of the s			
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pakei Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75,000,000	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkual Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Paket	75,600,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	Б	Penyedisan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacsan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50,060,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	2 Dakumen	50,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	6	Fasilitasi Kirijungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu	14	Б	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pofhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Laporan	150,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
В	1	1	2.06	9	Penyelenggarsan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengganan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporen	422,781,750	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Laporan	350,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SCPD	12 Dokumen	50,000,000	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Dokumen	100,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	510,218,250			- North		100 %	300,000,000		
8	01	01	2.07	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	510,218,250	Kota Bekasi Bekasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pendukung Prioritas	23 Unit	300,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan

	1	Vi			1	KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-			Сара	ion Kinerja da	n Kerangka Pendi	allean			u Rencana Kerja n 2025		Perangkat
						TAHUN 2021	1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/	Target Rencana	Pagu Indikatif	<b>版</b> 畫		Pri	oritas			Kelompok Sasaran	Penanggung
		Ko	de			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	Sub Kegiatan	Kerja (RENJA) Tahun 2024	Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daorah	Target	Pagu Indikatif		Jawab
		X.1		CAN DE	船上				5	= 6	1000	8	9	10	71	12	11	14
T	CH		1			2					Selatan, Margajaya		Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Daerah Lainnya				Bangsa Dan Politik
-	1	,	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	514,598,960					100 %	516,007,760		
-	1	,	-	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyedisan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aumlah Laporan Penyedisan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	514,598,960	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Laporan	515,007,760	Badan Kesbangpol Kota Betasi	Badan Kesatuan Bangsa Can Politik
	W.			56	N/B			Optimalisasi Paningkatan Sarana dan Presarana Aparatur	100 %						100 %			
8	1	,	,	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	652,000,000			Memperkuat		100 %	500,000,000		
8	1		1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	377,000,000	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	22 Unit	400,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1		1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75,000,000	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperiuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	25 Unit	100,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	,		1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Kota Bokasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	8	o	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

					KEPMENDAGRI NOMOR 058-5889 TAHUN 2021	NOMOR 980, 1, 15.5- 1317 TAHUN 2823				palan Kinerja (	dan Kerangka Pe	endanaan			aju Rencana Kerja um 2025		
		Ko	•		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Keglatan/	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencane Kerja	Pagu Indikatif Rencana Kerja	Leirasi	Samber		rioritas			Kelorapok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung
				5	Sub Kegistan	Sub Keglatan		(RENJA) Tahun 2024	(RENJA) Tahun 2024		Dana	Nasional	Daerah	Torget	Pagu Indikatif		Anvenib
	No. of	1		T SHOWING	PROGRAM	PROGRAM	4	5	6	7 7 0	8	9	10	11	12	13	la la
8	•	2			PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Optimalsasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	2,290,812,860					100 %	2,812,569,800	1 1 1 1 1 1 1	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.620 Orang	2,290,812,860					200 Orang	896,130,000		
							Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, fela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan		0					354 Crang	589,940,500		
							Terlaksananya pembinaan aktivites kepaskibrakaan dan pumapaskibraka	36.	0					2 Dokumen	181,762,000		
							Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	35	0					52 Orang	1,153,737,300		-
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideokogi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Palaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara. Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	1.620 Orang	2,290,812,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Deerah Lainnya	200 Grang	696,130,000	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
90	1	2	2.01	4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhinaka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karaktar Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bilineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.0	á	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	354 Orang	580,940,500	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	t	2	2.01	7		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepassibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapastibraka	v.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Poihukhankam Dan Transformasi	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	2 Dokumen	181,762,000	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

				1	NOMOR 050-5889	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1,15.5- 1317 TAHUN 2023			Сэр	alan Kinerja da	in Kerangka Pen	dahaan			u Rencana Kerja n 2025		Perangkat
		Kod			Urusan/ Bidang Urusan/	Urman/ Bidang Urusan/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencena	Pagu Indikatif			-	oritas			Kelorapok Sasaran	Daerah Penanggung
					Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	Program/ Kegistan/ Sub Kegiatan		Kerja (RENUA) Tahun 2024	Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		Jawab
	11/10	1	1891	1	EX 15.2	3 3		5 10	6 33	- 7	8	9	10	11	12	33	14
	1			1								Pelayanan Publik					
8	1	2	2.01	8		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	21	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	52 Orang	1,153,737,300	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	The same of	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100%	84,282,426,000					100%	15,229,773,200		
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksansan Bidang Pendidikan Politik,	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 Dokumen	82,748,270,000					12 Dakumen	14,479,773,200		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2.01		Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kalembagaan Pemerintahan, Penvakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.400 Orang	1,500,000,000					1504 Orang	750,000,000		
					Situasi Politik	Situasi Politik	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	12 Laporan	34, 156,000					2	0		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Name of	100				KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023			Ca.	palan Kinerja d	an Kerangka Pen	dansan			lu Rencana Kerja un 2025		
		Ko	de		Urusan/ Bideng Urusan/	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencana	Pagu Indikatif Rencana Keria		10.1		ripritas			Kelompok Saseran	Perangkat Daerah
					Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		(RENJA) Tahun 2024	(RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Datte	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		Penanggung Jawab
100	/ kinds	建設		370	2	1		5	6	3 7		9	10	37.	12	13 13	14
							Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit										14
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasiitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penvakilan dan Partal Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kalembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Pertai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusuan	21 Dokumen	82,748,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Dokumen	14,479,773,200	Lembaga pemerinteh, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
9	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Kogrdinasi di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilifasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umurr/Pemilihan Umurr Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Aumiah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Persai Kelembagaan Persai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.400 Grang	1,500,000,000	Kota Betasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	1504 Orang	750,000,000	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesabuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	12 Laporari	34.156,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Deerah Lainnya	-	0	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

					NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 908.1.15.5- 1317 TAHUN 2023				opalan Kinerja	dan Kerangka Per	ndanean			taju Rencana Kerja hun 2025		
		Ko			Urusan/ Bidong Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENUA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatir	Kelompok Sasaran	Perangi Daeral Penanggi Jawah
B						3		1 anun 2024	6	7 0			N = 30   35				
September 1998		4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Optimalisasi Pembirwan Organisasi Kemedyarakatan	100 %	8,595,411,700				10	100 %	9,800,000,000	- H	н
	1	4	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	41 Dokumen	7,850,411,700				A COMMON DECISION	5† Dakumen	9,000,000,000		
					Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	300 Orang	745,000,000					400 Orang	800,000,000		
	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendelfaran Ormas, Pembendayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	41 Dokumen	7,850,411,700	Kota Bekasi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memparkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Polayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	51 Dokumen	9,000,000,000	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluas dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Caerah	Jumlah Oreng yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftarah Ormas, Pamberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengkota Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	745,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Pandukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	400 Orang	800,000,000	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swariaya Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1000000000000000000000000000000000000	1	s			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Optimalisas pembinaan dan pengeribangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	1,000,000,000			Pubšk		100 %	1,400,000,000	111	
	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumiisan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Torlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kenukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepencayaan di Daerah	1.790 Grang	1,000,000.000					1900 Orang	1,400,000,000		

MIND SOLD					KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	<b>多语音</b>		c.	paion Kinerja c	lan Kerangka Pel	udanaan			aju Rencana Kerja un 2025		
		Kor	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kaglatan/	Urusan/ Bidang Urusan/	Indikator Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	Target Rencana	Pagu indikatif Rencana Keria	<b>1</b> 1	Sumber		rioritas		N II I	Kelompok Sasaran	Perangka Daerah
					Sub Registan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kerja (RENJA) Tahun 2024	(RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		Penanggur Jawas
H		AME:		1	2 2		Section of the section of	5	5 45 5 G	7	8	9	10	n	12		
8	1	5	2.01	3	Pelaksansan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasifitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasifitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepencayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosiai, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.700 Orang	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	1900 Orang	7,400,000,000	Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Masyaraket dan Stakeholder terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	•			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFIJK SOSIAL	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100%	5,337,400,000			# # T		100 %	3,837,490,000		
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangenan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tanaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serla Penanganan Konflik di Diserah	400 Drang	845,200,000					250 Orang	845,200,000		
							Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Oserah	12 Laporan	537,200,000					12 Laporan	537,200,000		
							Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dakumen	1,955,000,000					12 Dokumen	2,455,000,000		
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pementauan Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama listeljen, Pemantauan	400 Orang	845,200,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	250 Orang	845,200,000	Stakeholder terkeit dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangse Dan Politik

No.					NOMOR 050-5869 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 908.1.15.5- 1317 TAHUN 2823	图 4 章 章		Cap	alan Kinerja di	an Kerangka Pene	Sanaan			ju Rencana Kerja in 2025		Perangkat
		Koe	le i		Urusan/ Bidang Urusan/	Urusan/ Sideng Urusan/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Rencana	Pagu Indikatif Rencana Kerja		Sumber	Pr	ioritas	第 第		Kelompok Sasaran	Daerah Penanggung
			5		Program/ Keglatun/ Sub Keglatan	Program/ Keglatan/ Sub Keglatan	唐 章 章 章	Kerja (RENJA) Tahun 2024	(RENJA) Tahun 2024	Lekasi	Dana	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		daussi
		1			2 2	W SOUTH BOOK STATE	· 公司的 / 公司	MI5 188	15 15 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7	8	9	10	11	12	13	74
					Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lambaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik					
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evalussi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kega Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Ketja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di Daerah	Pelaksansan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intefjen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fazilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Peranganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pamantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSPER UMUA- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Pollukfrankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	12 Laporan	537,200,000	Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Pulitik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,955,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kusitas dan Daya Dukung Lingkungan	12 Dokumen	2,455,000,000	Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	Badari Kesatuan Bangsa Dan Politik
DE N	1					TOTAL			111,790,119,300	(A) (A) (A)		7	100		46,615,263,760		



## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024.

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada BakesbangpolKota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome ingin dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya penciptaan kesatuan dan keutuhan bangsa agar tetap harmonis di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran Bakesbangpol yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Teknokratik Tahun 2024-2026. Melihat hasil dari analisis evaluasi kinerja diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bekasi secara keseluruhan dari 2 (dua) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran dapat mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan.

# 4.2 KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Alokasi anggaran Bakesbangpol Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 111.790.119.300,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 8.892.463.853,- Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 6.070.415.238,- Belanja Hibah Rp. 89.751.766.000,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan realisasi keuangan 96% dan realisasi fisik Kegiatan 98,43%. Dalam proses pelaksanaan penganggaran yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol di tahun 2024 mengalami perubahan anggaran yang lumayan signifikan pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT), salah satu dasar dilakukan Anggaran Perubahan pada tahun 2024 yaitu karena ada catatan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) terkait dengan adanya

penambahan pagu anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada di tahun 2024 dan juga memperhatikan kondisi actual dan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9000.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dalam point C Nomor 2 (a) dan (b) yang berisikan tentang prosentase pengganggaran Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD; dan
- b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dengan dasar Surat Edaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyesuaikan NPHD kepada Lembaga yang menjadi penyelenggara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, sebagaimana berikut:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nomor : 774/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 593/PR.08-PKS/3275/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, dengan rincian :
  - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 36.496.000.000,-
  - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran
     Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.
     54.744.000.000,-
  - Jumlah Total Dana KPU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 dianggarankan sebesar Rp. 91.240.000.000,-
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bekasi, Nomor: 775/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor: 79/HK.02/K.JB-21/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota Bdan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, dengan rincian:
  - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.506.585.000,-

 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.728.388.000,-

Jumlah Total Dana BAWASLU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp. 22.234.973.000,-

Adanya perubahan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

# 4.3 RENCANA TINDAK

Untuk Tahun Anggaran 2024 Bakesbangpol Kota Bekasi berupaya untuk meyakinkan kepada pemilik anggaran daerah untuk lebih memprioritaskan program-program pembangunan yang ada di Bakesbangpol Kota Bekasi, khusunya di tahun 2024 terdapat urgensi Bakesbangol dalam proses penyelenggaraan pemilu di level pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan antar perangkat daerah, dan memfasilitasi lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian tugas Bakesbangpol lebih memprioritaskan dalam giat sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, serta memantau potensi konflik selama proses pemilu. Diharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik, akan tercipta pemilu yang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.

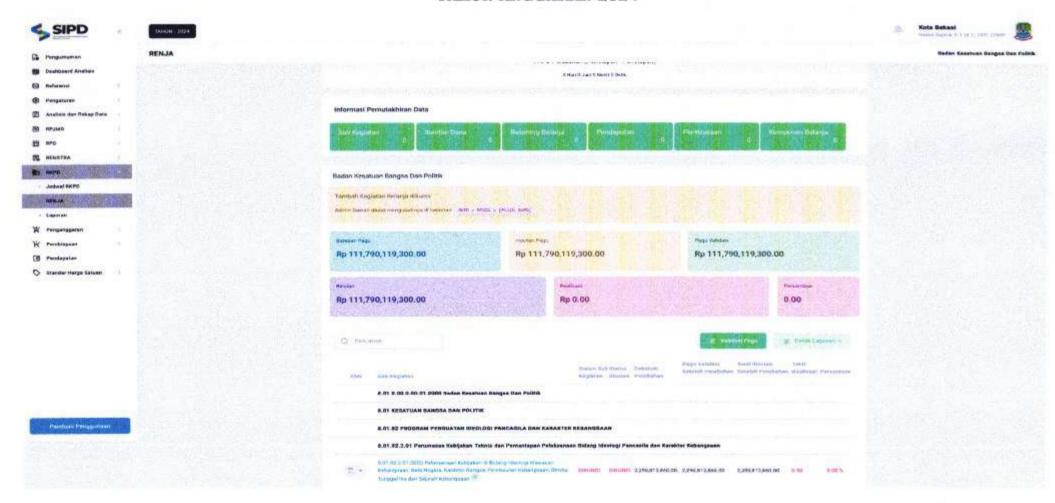
Kendala utama yang dihadapi Bakesbangpol Kota Bekasi di dalam melaksanakan tupoksinya adalah membangun persepsi yang sama dengan entitas perencanaan anggaran daerah bahwa fungsi kesatuan bangsa dan politik adalah fungsi yang penting di dalam menunjang stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Dengan adanya persepsi yang sama maka alokasi penganggaran akan menempatkan Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki skala prioritas tertentu di dalam mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
- Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
- c. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku.

- d. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan.
- e. Mengingkatkan peran media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan antar suku bangsa agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat luas, sehingga tercipta kondusifitas dan stabilitas daerah.

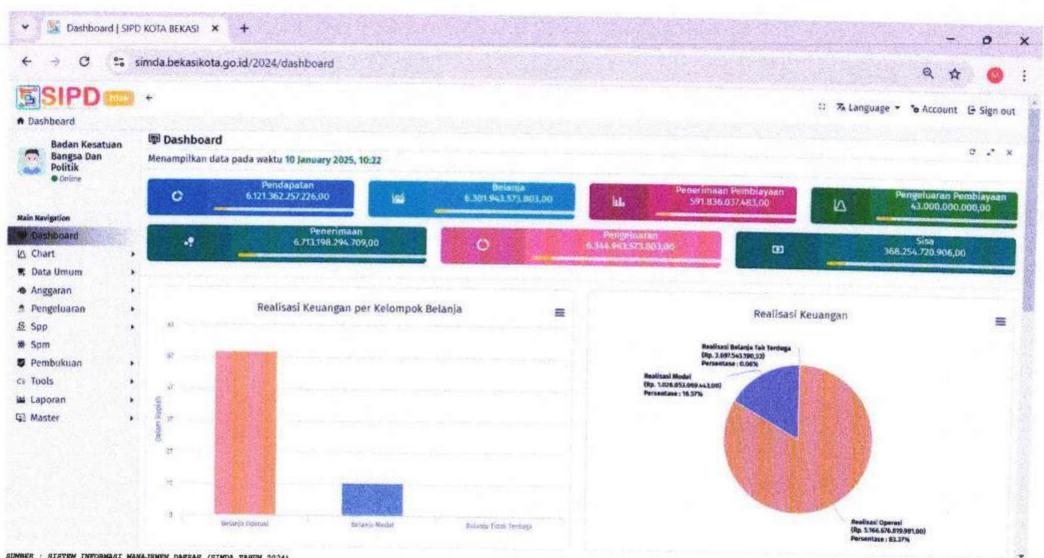
## DATA BUKTI PENDUKUNG AKUNTABILITAS ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024



SUMBER : SISTEM INFORMASI PEMERINTARAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2024 PADA PAGU ANGGARAN PERUBARAN BAKESBANGPOL (https://siod-ri.bernendegri.go.id/oengangparan/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/anggaran/an

4		VENNA PROPERTY		196907	TORC	"TOSTECO"		66.00		All and the state of	CAPACION PROBLEMS SHIP	WESTERN PERSONAL		******				PRESIDEN	TANKA PINE	PROFESSION
1	REEL	WATERLAND - THE COLUMN	THE COLUMN	2000	Marin Marin	"METATER"	TARGE	AT MES		PANA RESIDENCE (NO.		Deterlet/Decays (1842)	LONG	de changes thereby	- 77	societaria .	RELEASTON.	To Valle	SUMBOURER	PSYCKNOON
Œ		7072 V		4990		2000	1030309	MATERIA	MAJOR STOR	APPE BOOK	REPS PREJUNEAU SOL		777		MARKETON,	CHERAN	5.2000000	TARGET	PARK PORSATE RU	AAM
1	3	1		. 4	0.00	*				5.81	u	4	4	10-	- 10		- 11	10		26
	A day on 2004	Windowser Hobblesh Federal start Franchise House, Franchise Booking, House, Advantages Booking, Street, Advantages Booking, Street,	Paul di sanatigo d'Arbignito di Boltura Pilabasendi Informati, Jackes Bodhya dan salatigo Panagatian Panyidaga masa Valtadika Filabidia Birndagan Pilabidi Jirntalas Birndagan Pilabidi Jirntalas Birndagan Pilabidi Jirntalas di Hispirias Birnini galasi di Hispirias				1900 Orange		Lagron and an	) discouration per	Fisher old Property	0				1 Promagadam Padrug ap Padrug ap Padrug ap 1 mongadam Pamagadam Pamagadam Pamagadam Pamagadam Pamagadam	Hungar, Rusur Agama, 19604 Magyarasanga Masancasi Masar		100000000000	Self-Manager Manager Manager
1	elan eelay retop	Promaner Notices & Bid	ers ribelul asser Bruzophi, bytelel.	Bures de T	er bei Perceus	Date Philipping date	Hadden Fa	entire Parcharen	Unit Behales by Product	d Pages against all Dismot.	100000000000000000000000000000000000000			10				***		
			Jonasi Gropy yang Mangara Pilangan Pilangan Pilangan Bandara B				Income	Into diey	1 WO JUST 1982-00.	1 Age part such be.	a sole cath agends		Mills Folker, Increase Mills and dyna Terring 1000 Torial	SIMPA 		2 Siminghase Planting by Albert and Artists Portlands Total parties Total parties Personal and an Production			1,000,000,000,000	Rediscour's and what the control of
1	88140	PROCESS PRINCESTAS RESOUTADAS SERVICES CAS PRINCESTAS COMPETITOR CAS FAST COMP	Coll-replaced Post stress com Probered Food St. Oversch				100%	198.9	2,457,464,000,60	A 107.400 HIE 40	E 217-401-000,00	110,000,000,00							T 50° 300 400 400	
4		PSYMPLES ROOFLE																		
	PRIM221	Programmi Folizieren Pelitiki gen Michioniaren Harringen Hamagiarenen Espondi zen Fanetzeniar Konta Lutari	Their consign fluider spiritistics of tigation (fremal denigraphistics)				Participant of Facilities of State Control	in the second	4 8 ft 10 8 6 0 3 5	1 30F 400 MB CO	# ZHE ALL WHAT	900 (HILL 60)				CL Pyribleria Protein Protein Pyribleria 1 (Milliperia 1 (	Plater Berginer Personals Paracrotal Plater for tertail (b) Memorabat Plate Stellar		Salf-Intonee	ENDAL HELD ENTRATE CAS MOUSE
t	deliver things	Programme service of the	ang reasonage reason from the spiritual	ena bringer. Pr	moreover, I may	o suring Torongo no	ge congrame	newsparence in	mercinal (whiteholders)	regim Content International	or Montal Brieflyworkers, Inch.	Control world in team.		1		100000000000000000000000000000000000000	-	-		-
			AMME CONG DISC.  Misspace of Manitoria Actigation of Printing Security Advantages Security Activation Limits Relating, Activation Limits Relating, Activation Limits Relating, Activation Limits Relating, Activation Activation Relating Conference Security Activation Relating Security	ensole			(N) 1 Be/sq.	espiritury.	act ton List to	976-2002	98 200 00 pp	party or according to the state of the state of the state of	King Saleng, Compan Kingger dick Saleng Gell Stead	Trademin Haden Total Haden Total Res 2 Morts		CE Production Profession (Controlling Controlling Cont			Philippon	STORY SHOW
1	294 00 2 D1 2000	Colonianus Mersons Tran	es on Patrice & Strong Ke	essystas: D	Seators	any Parahesi	Citally Asking	Teneva Para Aut	y de Lettings hat y Finals	main Problems with the	as Facilitativistica Sil	my foreign time (with Person).	we shade a basis						100	
	450000		January Cognitive Mana- Manadowing to Column mem- therabowing to Column mem- therapy and the Column Management of Column Management (Column Management Management Man				Mir spaces	IF ( toop)	.ad/(min.mag))	N) HILLIAN	SAP rotar salamus	ю	Recordings Sections Sections Control Systems	DAMP LIMITATION DOLANCE POR MICH LIMITE		To Street Street, Stre			67,5740.6	CARROLL DAY
T	##16771100M	PROGRAM PROBABILITY	Perpendituelar habit open	- m	1			100	war introd	- SANGER	A Company	TOUR SAIN	70.0	diameter and				-		
			period Ones on PASE Policipano Proper Non-August Proper Non-August Proper or Technology Part pulse (None)				Descer.	University (	1 Specific 244.40	1 dia tuo discue	- Mag JOE COMAIN	100.000.000.00	Note the control of t	Property and a second		St. Persistency Publish Visit Segurary Charles Laterus IT Windshort, Holding Into			1 (00.000,000.00	BADAH KRAHI BANDAH SANI BOX (SHI
_			2001A			Contract of			test Type read size to		and the second second					Christian Carrier				

The Ingeneral District of Assets



SUMMER : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DARRAH (SIMDA TAHUN 2024) [https://simda.bekasikota.go.id/2024/dwaboard)



# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir **RKAP BELANJA** SKPD

#### PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01 Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.01

: 8-01.0-00.0-00.01

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Belanja Berdasarkan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

			Laborat	Jumlah (R	p)	Bertambah/(Berkura	ing)
Kode	Uralan	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1655 (190)		施-发 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	医 海 强 强 。		<b>建设备(P</b>		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			108.398.244.300,00	111.790.119.300,00	3.391.875.000,00	3,13
	Kosatuan Bangsa dan Politik			108.398.244.300,00	111.790.119.300,00	3.391.875.000,00	3,1
1.12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah K	abupaten/Kota		12.232.588.740,00	12.284.068.740,00	51.480.000,00	0,4
4.12.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja F			17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SILPA:	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.106.062.000,00	9.157.542.000,00	51,480.000,00	0,57
4 12 01 2 02 01	Penyedisan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendaputan Asil Daerah (P A D); Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.098.062.000.00	9.149.542.000.00	51.480.006,00	0.5
4.12.01,2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	8,000,000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		AV -	484.927.780,00	484.927.780,00	0,00	0,00
4.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendapatan Asii Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	200.000.000.00	200.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SILPA:	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000.00	20.000.000,00	0,00	0,00

			Lokasi	Jumlah (R	p)	Bertambah/(Berkura	ang)
Kode	Uraian	Sumber Dana	Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	医亲皮 医电影	图 图 隆	部 表 第 图 7	<b>京都 苏 庄 </b>		7	
4 12 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasii (DBH);	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264,927,780,00	264.927.780,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			947.781.750,00	947.781.750,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	350.000.000.00	350.000.000.00	0.00	0,00
4.12.01.2.06.05	Penyedisan Barang Cetakan dan Penggandsan	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	75,000,000,00	75.000.000,00	0.00	0,00
4.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SILPA:	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.781.750,00	422.781.750,00	0,00	0,00
4.12.01.2.05.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan. Margajoya	50,000,000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemerintah Daerah		510.218.250,00	510.218.250,00	0,00	0,00
4.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU):	Kota Bekasi, Semua Keramatan, Semua Kel/Desa	510.218.250,00	510.218.250,00	0,00	0,00
4.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan D	aerah		514.598.960,00	514.598.960,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asii Daerah (P.A.D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514,598.960,00	514.598.960.00	0.00	0,00
4.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus	n Pemerintahan Duera	h	652.000.000,00	652,000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.09.01	Penyodiaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	377.000.000,00	377.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	75.000.000,00	75.000,000,00	0,00	0,00

			Lokasi	Jumlah (R	p)	Bertambah/(Berkura	ang)
Kode	Uralan	Sumber Dana	Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
2. 3			更 华 本 美 一	F-1 2	· 表 水 多 和	高级 事	
4.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU):	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	200.000,000,00	200.000.000,00	0,00	0.00
4.12.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakte	Kebangsaan		2.290.812.860,00	2,290,812,860,00	0,00	0,00
4.12.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelak Kebangsaan	sanaan Bidang Ideolog	gi Pancasila dan Karakter	2.290.812.860,00	2.290.812.860,00	0,00	0,00
4 12 02 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsi, Pernbauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Békasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.290.812.860,00	2.290.812.860,00	9,00	0,00
4.12.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lemb Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	aga Pendidikan Melalu	i Pendidikan Politik Dan	80.942.031.000,00	84.282.426.000,00	3.340.395.000,00	4,13
4.12.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelal Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembag Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, s	aan Pemerintahan, Per	rwakilan dan Partai Politik,	80.942.031.000,00	84.282.426.000,00	3.340.395.000,00	4,13
4.12.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	SILPA: Dana Cadangan;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	79.407.875.000.00	82.748.270.000,00	3.340.395.000,00	4,21
4.12.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asil Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,000.00	1.506,000.000,00	0,00	0.00
4.12.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.156.090,90	34.156.000,00	0.00	0,00
4.12.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisa	i Kemasyaraketan		8.595.411.700,00	8.595.411.700,00	0,00	0,00
4.12.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelal Organisasi Kemasyarakatan	sanaan Bidang Pembe	rdayaan dan Pengawasan	8.595.411.700,00	8.595.411.700,00	0,00	0,00

Kode	Urajan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (	Rp)	Bertambah/(Berkur	rang)
NACC STATE OF THE PARTY OF THE	orbian .	Sumber Dana	Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	<b>基本重要基本</b> 重	图 图 题	国 · 第 · 第 · 图	表 表 新 图 图	· 编 · 4. 高 · 3.	7 7	C 1/2 W
4.12.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P.A.D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	7.850.411.700,00	7.850.411.700.00	0,00	0,1
4.12.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asii Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.000.000,00	745.000.000,00	0,00	9,0
4.12.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahana	Ekonomi, Sosiel, Dan I	Budaya	1.000.000.000,00	1.000,000,000,00	20	
4.12.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pela Budaya	ksanaan Bidang Ketaha	nan Ekonomi, Sosial dan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,0
4.12,05.2,01.03	Pelaksansan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,06	0.00	0,00
4.12.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan P Konflik Sosial	eningkatan Kualitas Da	n Fasilitasi Penanganan	3.337.400.000,00	3.337.400.000,00	0,00	0,00
4.12.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksangan Pem Konflik Sosial	antapan Kewaspadaan I	Vasional den Penanganan	3.337.400.000,00	3.337.400.000,00	0,00	0,00
4.12.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemartauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	845.200.000,00	845.200.000,00	0.00	0,00
4.12.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Grang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fashitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	537.200.000,00	537.200.000,00	0,00	0,00
4.12.06.2.01.06	Pelaksansan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	SILPA:	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.955.000.000,00	1.955.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ANGGARAN			108.398.244.300,00	111.790.119.300.00	3.391.875.000.00	



# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA BELANJA SKPD

#### PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi

8-01.0-00.0-00.01

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi :

8-01.0-00.0-00.01.01

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

# Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Berdasarkan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode 8 8.1 8.1.01		1				Ju	mlah			
			Lokasi				т			
Kode	Uraian	Sumber Dana	Kegiatan	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	jumlah	T+1
		3 6 M			111.270.794.050,00 519.325.250,00 0,00 0,00 111.790.119 111.270.794.050,00 519.325.250,00 0,00 0,00 111.790.119 11.764.743.490,00 519.325.250,00 0,00 0,00 12.284.068					-
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			0,00	111.270.794.050,00	519.325.250,00	0,00	0,00	111.790.119.300,00	0,00
81	Kesatuan Bangsa dan Politik			0,00	111.270.794.050,00	519.325.250,00	0,00	0,00	111.790.119.300,00	0,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Da	erah Kabupaten/Kota		0,00	11.764.743.490,00	519.325.250,00	0,00	0,00	12.284.068.740,00	0,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi K	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00		
8.1.012.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kineria dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	SELPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan. Margajaya	0,00	17.000.000,00	0.00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
8.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0,00	9.157.542.000,00	0,00	0,00	0,00	9.157.542.000,00	0,00
8.1.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (P A D); Dana Transfer Umurn- Dana Alokasi Umurn (DAU);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.00	9.149.542,000,00	0,00	0,00	0,00	9.149.542.000,00	0.00
8.1.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasii (DBH);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0.00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
8,1,01,2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera	h		0,00	484.927.780,00	0,00	0,00	0,00	484.927.780,00	0,00
8.1.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	200.000.000,00	0,00	0.00	0,00	200.000.000,00	9,00

				January 1980		Jui	mlah			
Vede	Uraian	Sumber Dana	Lokasi				T			
Kode	Gratan	Sumber Dana	Kegiatan	т-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	jumlah	T+1
	多亚亚洲亚亚		图 图 图 图		<b>新華 華 第</b>	*	1 道	- A	10	- T
8.1.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0.00	20.000.000,00	0,00
8.1.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum- Dana Bag: Hasii (DBH);	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	264.927.780,00	0,00	0.00	0,00	264.927.780,00	0,00
8.1.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,00	936.732.750,00	11.049.000,00	0,00	0,00	947.781.750,00	0,00
8.1.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SILPA:	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00	0,00	0.00	0,00	350.000.000,00	0,00
8.1.01,2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SILPA:	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	75.000.000,00	0,00	0.00	0,00	75.000.000,00	0.00
8.1.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000.000,00	0,00
8.1.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SILPA;	Semue Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	422.781.750,00	0,00	0,00	0,00	422,781,750,00	0.00
8.1.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPO	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	38.951.000,00	11.049.000,00	0.00	0,00	50.000.000,00	0,00
8.1.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang i	Urusan Pemerintah Dae	rah	0,00	1.942.000,00	508.276.250,00	0,00	0,00	510.218.250,00	0,00
8.1.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU):	Kota Bekasi. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.00	1,942,000,00	508.276.250.00	0.00	0.00	510.218.250,00	0,00
8.1.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin	tahan Daerah		0,00	514.598.960,00	0,00	0,00	0,00	514.598.960,00	0,00
8.1.01.2 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	514.598.960,00	0,00	0,00	0,00	514.598.950,00	9,00
8.1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan	ng Urusan Pemerintahan	Daerah	0,00	652.000.000,00	0,00	0,00	0,00	652.000.000,00	0,00

Kode						Ju	mlah			
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi				т			
			Kegiatan	T+1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	jumlah	T+1
	16 多多速度		1 42 4	51	图 源• 集 组	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		9	10	
8.1.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00	0,00
8.1.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0.00	75.900.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
8.1.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0.00	200.000.000,00	0,00	0,00	0.00	200.000.000,00	0,00
8.1.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan K	arakter Kebangsaan		0,00	2.290.812.860,00	0,00	0,00	0,00	2.290.812.860,00	0.00
8.1.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.290.812.860,00	0,00	0,00	0,00	2.290.812.860,00	0,00
8.1.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendapatan Asli Daerah (P.A.D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Ket/Desa	0,00	2.290.612.860.00	0.00	0,00	0,00	2 290.812.860,00	0,00
8.1.03	Program Peningkatan Peran Partal Politik Da Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Polit		Melalui Pendidikan Politik	0,00	84.282.426.000,00	0,00	0,00	0,00	84.282.426.000,00	0,00
8.1.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemontapa Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasi Partal Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Um Politik	litasi Kelembagaan Per	nerintahan, Perwakilan dan	0,00	84.282.426.000,00	0,00	0,00	0,00	84.282.426.000,00	0,00
8.1.03.2.01.91	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasihtasi Kelembagaan Penserintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	SILPA; Dana Cadangan;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	0,00	82.748.270.000,00	0,00	0.00	0,00	82.748.270.000.00	0,00
8.1.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asii Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000.000.00	00,0	0,00	0,00	1.500.900.000,00	0.00

						Jui	mlah					
w	Heales	Sumber Dana	Lokasi				T					
Kode	Uralan	Sumper Dana	Kegiatan	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1		
	<b>建多基金基</b>		聚 等 图 图	3	8 图 图 图	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>b</b> • <b>b</b>	<b>3.</b>	10	1		
8,1.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pandidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penvakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.156.000,00	0,00	0,00	0.00	34.156.000.00	0,00		
8.1.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Or	ganisasi Kemasyarakat	an	0,00	8.595.411.700,00	0,00	0,00	0,00	8.595.411.700,00	0,00		
8.1.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	8.595.411.700,00	0,00	0,00	0,00	8.595.411.700,00	0,00				
8.1,04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendattaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asii Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.850.411.700.00	0,00	0.00	0.00	7.850,411.700,00	0,00		
8.1.04.2.01.03	Petaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000.000,00	0,00		
8.1.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ket	tahanan Ekonomi, Sosia	il, Dan Sudaya	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00		
8.1.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa dan Budaya	an Pelaksanaan Bidang	Ketahanan Ekonomi, Sosial	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00		
8.1.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosiat, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000.00	0.00		
8.1.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasiona Penanganan Konflik Sosial	il Dan Peningkatan Kua	litas Dan Fasilitasi	0,00	3.337.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.337.400.000,00	0,00		
8.1.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksana Penanganan Konflik Sosial	an Pemantapan Kewasp	adaan Nasional dan	0,00	3.337.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.337.400.000,00	0,00		

						Jui	mlah			
			Lokasi				т			
Kode	Uralan	Sumber Dana	Kegiatan	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	jumlah	T+1
	来 電 本		温金 签		推 正 推		章 墨		10	11
8.1.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	SILPA:	Kpta Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	845.200.000,00	0,00	0.00	0,00	845.200.000,00	0,00
8.1.06.2 01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	537.200.000,00	0,00	0.00	0,00	537.260.000,00	0,00
8.1.06.2.01,06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	SILPA:	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.00	1.955.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.955.000.000,00	0,00
	TOTAL ANGGAP	AN		0,00	111.270.794.050,00	519.325.250,00	0,00	0,00	111.790.119.300,00	0,00



# PEMERINTAH KOTA BEKASI REALISASI BELANJA PER SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 Periode : 01 January 2024 s/d 31 December 2024

Urusan Pemerintahan : 4.12

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

Unit Organisasi Sub Unit Organisasi

4.12.01 : 4.12.01.01

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	URAIAN	ANGGARAN		OPERASI		wone		70741		SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA	MODAL	ВТТ	TOTAL	%	
4.12 . 4.12.01.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.284.068.740,00	8.892.463.853,00	1.907.491.454,00	9,00	292.040.000,00	0,00	11.091.995.307,00	90,30	1.192.073.433,00
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	0,00	13.625.000,00	0,00	0,00	0,00	13.625.000,00	80,15	3.375.000,00
4.12 4.12.01.01 . 01.2.01.06	Koprdinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000.00	0,00	13.625.000,00	0.00	0.00	0,00	13.625.000,00	80,15	3.375.000,00
4.12 . 4.12 01 01 . 01.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.157.542.000,00	8.892.463.853,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	8.899.213.853,00	97,18	258.328.147,00
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.149.542.000,00	8.892.463.853,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8.892.463.853,00	97,19	257.078.147,00
4.12 . 412.01.01 . 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwulanaruSemesteran SKPD	8.000.000,00	0,00	6.750.000,00	0.00	0,00	9,00	6.750.000,00	84,38	1.250.000,00
4.12 4.12.01.01 .01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	484.927.780,00	0,00	304.698.000,00	0,00	0,00	0,00	304.698.000,00	62,83	180.229.780,00
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000,00	0,00	136.750.000,00	0.00	0,00	0,00	136.750.000,00	68,38	63,250,000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4 12 4 12 01 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	264.927.780,00	0.00	167.948.000,00	0,00	0,00	0,00	167.948.000,00	63,39	96.979.780,00
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	947.781.750,00	0,00	563.858.609,00	0,00	0,00	0,00	563.858.609,00	59,49	383.923.141,00
4.12 4.12.01.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000,00	0,00	322.875.200,00	0.00	0,00	0.00	322.875.200,00	92,25	27.124.800,00
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000,00	0,00	41.780.000,00	0,00	0,00	0,00	41.780.000,00	55,71	33,220.000,00

		1			REALISA	ASI				
KODE	URAIAN	ANGGARAN						SISA ANGGARAN		
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA	MODAL	BTT	TOTAL	%	
4.12 4.12.01.01 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	0,00	21.362.500,00	0,00	0,00	0,00	21.362.500,00	42,73	28.637.500
1.12 . 4.12.01.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.781.750,00	0,00	153.226.309,00	0,00	0,00	0,00	153.226.309,00	36,24	269.555.441,
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	0.00	24.614.600,00	0.00	0,00	0,00	24.614.600,00	49,23	25.385.400.0
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510.218.250,00	0,00	0,00	0,00	292.040.000,00	0,00	292.040.000,00	57,24	218.178.250,0
4.12 4.12.01.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	510.218.250,00	0,00	0,00	0,00	292.040.000,00	0,00	292,040,000,00	57,24	218.178.250.0
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.598.960,00	0,00	507.017.960,00	0,00	0,00	0,00	507.017.960,00	98,53	7.581.000,0
1.12 - 4.12.01.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514 598 960,00	0,00	507.017.960,00	0.00	0,00	0,00	507.017.960,00	98,53	7.581.000,0
1.12 . 4.12.01.01 . 01.2.09	Pemeliheraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.000.000,00	0.00	511.541.885,00	0,00	0,00	0,00	511.541.885,00	78,46	140,458,115,0
8.12 · 4.12.01.01 · 01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	377,000.000,00	0.00	309.959.885.00	0,00	0.00	0,00	309.959.885,00	82,22	67.040.115,0
4.12 . 4.12.01.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	0.00	37.340.000,00	0,00	0.00	0.00	37.340.000,00	49.79	37.660.000.0
1.12 - 4.12.01.01 : 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000.00	0,00	164.242.000,00	0,00	0,00	0,00	164.242.000,00	82,12	35.758.000,0
12 4 12 01 01 . 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.290.812.860,00	0,00	1.663.360.738,00	0,00	0,00	0,00	1.663.360.738,00	72,61	627.452.122,0
5.12 - 4.12.01.01 - 02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.290.812.860,00	0,00	1.663.360.738,00	0,00	0,00	0,00	1.663.360.738,00	72,61	627.452.122,0
4.12 . 4.12.01.01 . 02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	2.290.812.860,00	0,00	1.663.360.738.00	0,00	0.00	0,00	1.663.360.738,00	72,61	627.452.122.00
4.12 . 4.12.01.01 . 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	84.282.426.000,00	0,00	797.347.500,00	82.421.766.000,0 0	0,00	0,00	83.219.113.500,00	98,74	1.063.312.500,00

					REALISAS	il.				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		OPERASI			втт	TOTAL	%	SISA ANGGARAN
KODE	5.50		PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA	MODAL	-	45500		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Peruakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	84.282,426.000,00	0,00	797,347.500,00	82.421.766.000,0	0,00	0,00	83.219.113.500,00	99,61	1.063.312.500,04
4.12 .4.12.01.01 .03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	82,748,270,000,00	0,00	9,00	82.421.766.000,00	0,00	0.00	82 421.766 000.00 797 347 500.00		702.652.500.0
4.12 . 4.12.01.01 . 03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.500.000.000,00	0,00	797.347.500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	34.156.000,0
4.12 . 4.12.01.01 . 03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umuru/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34,156,000,00	0.00	0,00						
4.12 . 4.12.01.01 . 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.595.411.700,00	0,00	\$54.324.500,00		0,00	0,00	7.884.324.500,00		711.087.200,0
4.12 . 4.12.01.01 . 04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.595.411.700,00	0,00			0,00	0,00	7.884.324.500,00 7.330.000.000,00		520.411.700.0
4.12 . 4.12.01.01 . 04.2.01.0		7.850.411.700.00	0.00	0.00	7.330.000.000,00	0.00	0,00	7.330.000.000,00	93,37	320.411.700.0

					REALIS	ASI				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		OPERASI	- S	0.50			T	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA	MODAL	BTT	TOTAL	%	
4.12 - 4.12.01.01 - 04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evalussi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	745.000.000,00	0,00	554.324.500,00	0.00	0,00	0,00	554.324.500,00	74,41	190 675 500,0
4.12 . 4.12.01.01 . 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.000.000.000,00	0,00	788.962.000,00	0,00	0,00	0,00	788.962.000,00	78,90	211.038.000,0
4.12 . 4.12.01.01 . 05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.000.000.000,00	0,00	788.962.000,00	0,00	0,00	0,00	788.962.000,00	78,90	211.038.000,0
5.12 , 4.12.01.01 , 05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Social, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat, Beragama dan Penghayat Keperceyaan di Daerah	1.000.000.000,00	0,00	788-962,000,00	0,00	0.00	0,00	788.962.000,00	78,90	211.038.000,0
1.12 . 4.12.01.01 . 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.337.400.000,00	0,00	2.266.420.500,00	0,00	0,00	0,00	2.266.420.500,00	67,91	1.070.979.500,0
12 . 4.12.01.01 . 06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.337.400.000,00	0,00	2.266.420.500,00	0,00	0,00	0,00	2.266,420.500,00	67,91	1.070.979.500,00
.12 . 4.12.01.01 . 06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anter Negara, Fasilitasi Kelembagsan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	845-200-000-00	0,00	569.588.000,00	0,00	0,00	0,00	569.588.000,00	67,39	275.612.000,00
.12 .4.12.01.01 .06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pernantasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	537.200.000.00	0.00	496.832.500,00	0,00	0.00	0,00	496.832.500,00	92,49	40.367.500,00
.12 . 4.12.01.01 . 06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.955.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	61,38	755.000.000,00
	JUMLAH	111.790.119.300,00	8.892.463.853,00	7.977.906.692,00	89.751.766.000,0	292.040.000,00	0,00	106.914.176.545,00	95.64	4.875.942.755,00